

**PENGEMBANGAN PARIWISATA  
UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul-Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk menempuh Ujian Sarjana Pada  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Disusun Oleh :**

**Hastuty Wahyuningsih**

**NIM. 0310313045-31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2007**

## RINGKASAN

Hastuty Wahyuningsih, 2007. **Pengembangan Pariwisata Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul-Yogyakarta).**

Dosen pembimbing : Drs. Siswidiyanto, MS dan Dra Siti Rochmah, Msi.

Pariwisata merupakan sektor andalan bagi banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Sektor pariwisata di promosikan sebagai sektor yang dapat dikembangkan di berbagai tempat, meskipun tempat itu tidak memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk industri sekunder. Sebagai salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam menyumbang pendapatan negara, negara belum memberikan perbaikan yang memadai sesuai dengan kontribusi sektor ini. Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata budaya. Masyarakat Bantul secara turun temurun berpegang teguh pada adat dan budaya jawa yang adiluhung. Berbagai kiat untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Pengembangan Produk Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang potensi pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Bantul, mengetahui dan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan sektor pariwisata, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata, serta mengetahui dan menganalisis kontribusi sektor pariwisata dalam menunjang Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar, meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan, dan sentra industri kerajinan. Lokasi potensi wisata Kabupaten Bantul tersebar di Kecamatan Kretek, Imogiri, Sanden, Srandakan, Pajangan, Kasihan, dan Piyungan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan yang dilakukan oleh DIPARDA Bantul dan pemerintah daerah belum membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga kontribusi yang diberikan bagi pendapatan asli daerah juga belum optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan, yang paling utama adalah keterbatasan dana yang sangat dirasakan sekali oleh DIPARDA. Selain itu juga bencana alam dan kondisi cuaca buruk yang mengancam beberapa daerah pantai termasuk kawasan Parangtritis dan pantai Pandansimo. Perkembangan jumlah wisatawan juga berperan penting dalam mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata. Dari hasil penelitian, jumlah PAD Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun tidak dengan penerimaan dari sektor pariwisata. Diperlukan upaya lebih maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan frekuensi program pengembangan yang dilakukan.

## SUMMARY

Hastuty Wahyuningsih, 2007. **Tourism Development to Support Regional Native Income (Study on Tourism Agency of Bantul Regency, Yogyakarta)**  
Counsellor : Drs. Siswidiyanto, MS and Dra. Siti Rochmah, M.Si

Tourism is a main sector for many developing countries like Indonesia. Tourism sector is promoted as a sector that can be developed in many places, although that place doesn't have natural resources that can be used for secondary industries. As a sector which has important role in contributing national income, the state hasn't given appropriate improvement according to this sector's contribution. Bantul Regency has culture tourism potency. Bantul society has held firmly the highly sacred Javanese custom and tradition since a long time ago. Many tricks to reach that aim have been done through Tourism Product Development Program and Tourism Marketing Program.

The aims of this research are to get real picture of tourism potency at Bantul Regency, to know the efforts that have been done by Bantul government in order to develop tourism sector, to know the supporting and impeding factors in developing tourism sector, and to know and analyze tourism sector contribution on supporting Regional Native Income in Bantul Regency.

This research used descriptive research by using qualitative approach. And the research locations are Bantul Tourism Agency and Bantul Regional Income Agency.

Based on the research result there is picture that Bantul Regency has many tourism object potencies, covering natural tourism objects, culture/history, and education tourism, solace park, and handycraft industry center. Bantul tourism potency locations are spreading at Kretek, Imogiri, Sanden, Srandakan, Pajangan, Kasihan, and Piyungan Subdistrict.

The research result shows that the development efforts that have been done by DIPARDA Bantul and regional government still don't get maximum results. That's why the contribution given to regional native income isn't optimum. That is caused by many impeding factors, the main factor is fund limitation that is felt by DIPARDA. Besides that the natural disaster and bad weather are threatening some beaches including Parangtritis and Pandansimo. Tourist amount development also has important role in influencing income from tourism sector. From the research result, the amount of Bantul PAD is increasing significantly from year to year, but not with the income from tourism sector. There should be more maximum efforts from that regional government to increase the development program frequency.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang sangat dalam penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rakhmat dan ridhoNya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul Pengembangan Pariwisata Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis harapkan segala kritik dan saran dari semua pihak. Penulis juga sangat menyadari bahwa tanpa dorongan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sudah tentu penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai.

Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan bantuan yang sangat berarti, kepada :

1. Bapak DR. Suhadak. M.Ec. Selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, MA. selaku ketua jurusan Fakultas Ilmu Administrasi dan Bapak Drs. Soekanto, M.S. selaku sekretaris jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Bapak/ Ibu Dosen pengajar beserta seluruh staf karyawan FIA yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Sisiwidiyanto, M.S. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Siti Rohcmah, M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan dorongan yang telah diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyantono, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atas diberikannya ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Bapak Tlau Sakti Santoso, SS.M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan DIPARDA Bantul dan Ibu Setyawati, S.Psi selaku Kepala SUB Bagian Kepegawaian DIPARDA Bantul dan seluruh pegawai Dinas Pariwisata Bantul yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi sehingga terlaksananya skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya. Terima kasih untuk semangat dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama ini baik dalam suka maupun duka.
7. Untuk sahabatku Dunik, terimakasih untuk semangat, dorongan dan saran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Untuk Musa, terimakasih banyak penulis ucapkan atas kesediaan dan bantuan yang diberikan.
9. Untuk Dityo, terima kasih atas semua semangat, perhatian, bantuan yang diberikan dan kesabaran menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman FIA UNIBRAW serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan doa dan semangat yang diberikan selama ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Malang, Juni 2007

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>MOTTO</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>TANDA PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pariwisata.....	12
1. Pengertian Pariwisata dan Wisatawan.....	12
2. Macam dan Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata.....	15
B. Jenis Sarana Dan Prasarana Pariwisata.....	18
1. Sarana Pariwisata.....	18
2. Prasarana Pariwisata.....	19
C. Peranan Industri Pariwisata.....	20
D. Pemerintahan Daerah.....	21
1. Desentralisasi.....	23

2. Otonomi Daerah.....	23
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	26
F. Pengembangan Pariwisata .....	28
G. Pelayanan Publik di Bidang Pariwisata .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Penyajian Data Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	42
a. Keadaan Geografis .....	42
b. Keadaan Topografi.....	43
c. karakteristik Penduduk .....	43
d. Tata guna Lahan .....	44
e. Visi dan Misi Kabupaten Bantul .....	44
f. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Daerah.....	48
2. Data Fokus Penelitian.....	58
a. Potensi Pariwisata Yang Ada di Kabupaten Bantul.....	58
b. Upaya Pengembangan Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Pariwisata Untuk Menunjang PAD .....	76
c. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengembangan Pariwisata.....	88
d. Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Menunjang PAD.....	92
B. Analisa dan Interpretasi Data.....	99
1. Potensi Pariwisata Yang Ada di Kabupaten Bantul.....	99

2. Upaya Pengembangan Daerah Kabupaten Bantul Dalam  
Mengembangkan Pariwisata Untuk Menunjang PAD ..... 100

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dalam  
Pengembangan Pariwisata ..... 111

4. Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Menunjang PAD ..... 116

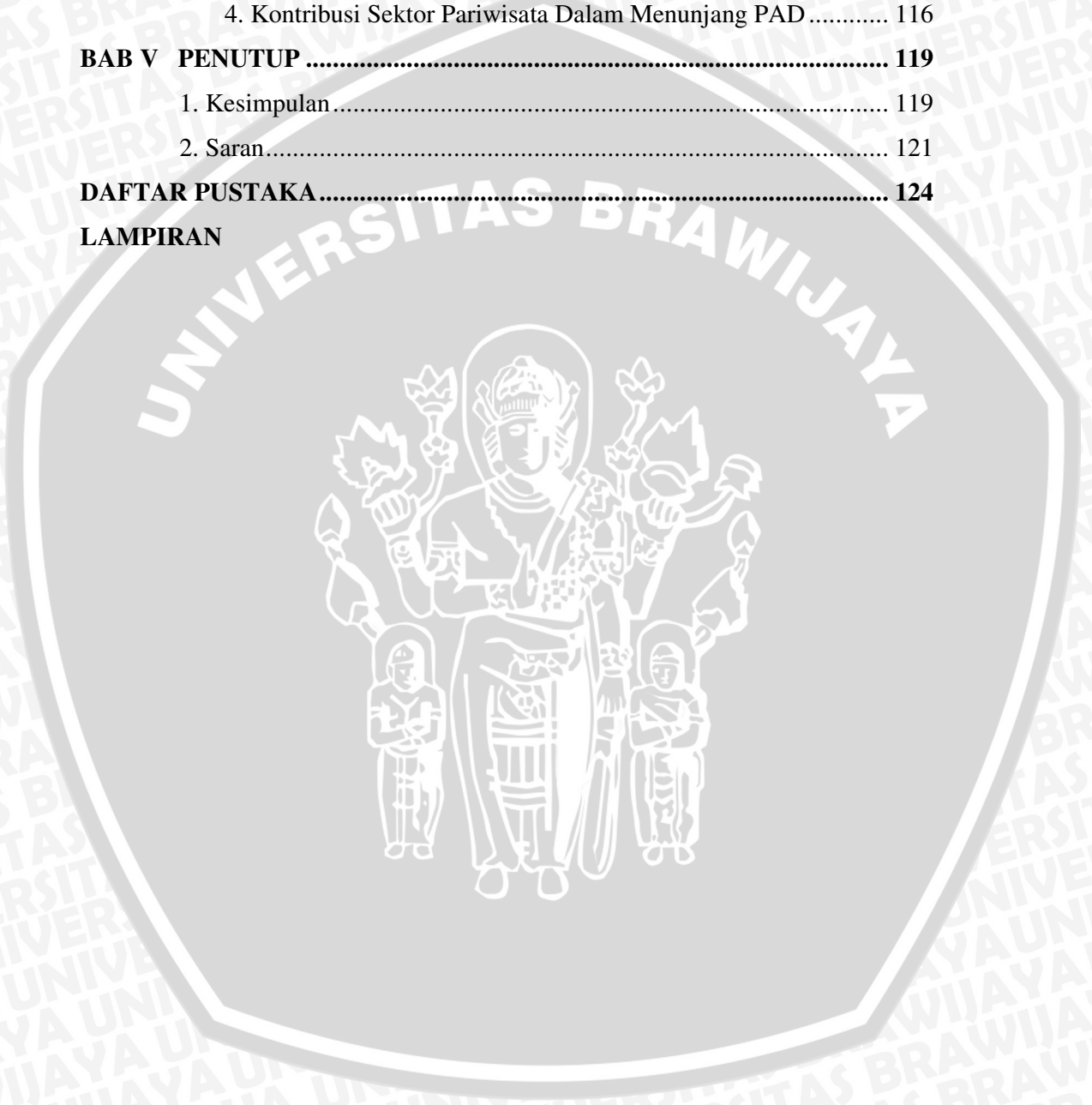
**BAB V PENUTUP ..... 119**

1. Kesimpulan ..... 119

2. Saran ..... 121

**DAFTAR PUSTAKA ..... 124**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
1	Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul Menurut Jabatan	55
2	Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Menurut Golongan tahun 2006	56
3	Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2007	57
4	Obyek Wisata Pantai Kabupaten Bantul	59
5	Obyek Wisata Alam Kabupaten Bantul	59
6	Obyek Wisata Goa dan Hutan	60
7	Agrowisata	60
8	Obyek Wisata Sejarah	61
9	Obyek Wisata Budaya di Bantul	63
10	Perkembangan Jumlah Rumah Makan di Bantul	77
11	Rumah Sakit di Kabupaten Bantul	80
12	Perkembangan Wisatawan di Kabupaten Bantul (1994-2004)	93
13	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Per Jenis Pendapatan di Kabupaten Bantul tahun 2003-2006	95
14	Perkembangan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2003-2006	97
15	Sumbangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2003-2006	98

## DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1	Peta Daerah Kabupaten Bantul	47
2	Struktur Organisasi Kabupaten Bantul	50
3	Pantai Parangtritis	64
4	Pantai Samas	65
5	Pantai Patehan	65
6	Pantai Pandansimo	66
7	Gumuk Pasir	67
8	Taman Rekreasi Tirtotamansari	67
9	Gua Selarong	68
10	Sendang Kasihan	68
11	Goa Gajah	69
12	Goa Jepang	70
13	Makam Bela Belu	70
14	Kompleks Makam Raja-raja Imogiri	71
15	Goa Cerme	71
16	Kerajinan manding (Kulit)	73
17	Kerajinan Batik Giriloyo	74
18	Peta Wisata Kabupaten Bantul	75

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor andalan bagi banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kecenderungan dunia menunjukkan pariwisata menjadi industri terbesar di dunia dan menjadi pilihan tepat bagi negara berkembang atau dunia ketiga untuk keluar dari keterbelakangan.

Sektor pariwisata di promosikan sebagai sektor yang dapat dikembangkan di berbagai tempat, meskipun tempat itu tidak memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk industri sekunder. Ini disebabkan karena industri pariwisata ditumbuhkan dari adanya keindahan lokal dan budaya masyarakat lokal yang menarik minat orang untuk melihat dan menikmati dari dekat Sebagai salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam menyumbang pendapatan negara, negara belum memberikan perbaikan yang memadai sesuai dengan kontribusi sektor ini. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan pada masa orde baru yang tersentralisir di pemerintahan pusat, sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, dari perencanaan, implementasi dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah menjadi pihak pelaksana dari setiap kebijakan pemerintah pusat.

UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menggantikan UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, kemudian UU No 22 Tahun 1999 tersebut digantikan oleh UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang yang baru ini menitikberatkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan menerapkan azas desentralisasi pada daerah Kabupaten dan daerah Kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berimplikasi pada penyerahan kewenangan beberapa urusan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat termasuk didalamnya sektor pariwisata.

Kewenangan otonomi yang luas menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ( 1999: 57 ) adalah :

”Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi”.

Kewenangan yang nyata memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menangani urusan pemerintahannya berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa : untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalau sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam sistem pemerintahan sentralistik Orde Baru yang baru berlalu “orang daerah” seringkali diperlakukan sebagai pelaksana kebijaksanaan, keputusan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat. Perasaan direndahkan kemudian membuat daerah ingin memiliki kewenangan otonom yang makin lama makin menguat. Salah satu kewenangan otonom yang nyata bagi Pemerintah Daerah (pemda) adalah pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik sehingga potensi yang ada didaerah dapat dikembangkan secara optimal. Hal ini dikarenakan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dianggap lebih mengerti dan memahami karakteristik masyarakat serta sumber daya yang ada di daerah tersebut.

Untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, maka kepada daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada agar dapat dijadikan sebagai sumber keuangan. Karena dengan adanya otonomi daerah berarti daerah harus mencari sumber dana sendiri diluar Dana Alokasi Umum (DAU). Tetapi fenomena yang terjadi adalah pemerintah daerah sering lupa bahwa substansi dari penyelenggaraan otonomi daerah bukan ditentukan oleh besarnya dana subsidi pusat yang diberikan, melainkan kreatifitas dan inovatif yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : untuk penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah yang dipungut dan diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dikatakan ideal apabila mampu memberikan kontribusi terbesar dari seluruh pendapatan daerah lainnya. Dengan alasan bahwa negara kita memiliki kekayaan dan keindahan alam yang berbeda-beda disetiap daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki potensi dan karakteristik yang beraneka ragam untuk mengelola daerahnya masing-masing sebagai suatu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ini berarti urusan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten atau kota-lah yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Revisi terhadap undang-undang tersebut yang berwujud UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menguatkan kedudukan pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai pihak yang berwenang dan berkewajiban dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata menjadi urusan pemerintah kabupaten yang bersifat pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan ekonomi sebagai perwujudan desentralisasi yang menjadi amanat UU No.33 tahun 2004 pasal 33.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah lebih besar daripada sebelumnya. Namun sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, kewenangan pengembangan pariwisata lebih banyak pada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan dinas pariwisata pemerintah provinsi justru makin berkurang bahkan terbatas membantu daerah dalam pembinaan dan promosi pariwisata (Nagib, 2003 :19).

Idealnya aktivitas dan kiprah sektor pariwisata di daerah harus lebih leluasa dan tidak menghadapi kendala lintas sektoral. Selama ini, penanganan dan pengembangan kepariwisataan di daerah sering menghadapi kendala yang bermuara pada fanatisme departemen atau karena hambatan mekanisme prosedural yang birokratis, baik mengenai langkah operasional maupun soal anggaran (Sugiantro, 2000:127-130).

Diharapkan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata berupaya lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengorganisasian kepada seluruh pihak industri pariwisata di daerah. Selain itu juga peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pengembangan pariwisata yang nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembinaan kolompok sadar wisata, seni budaya, dan industri kerajinan.

Menurut Spillane ( 1994 : 57 ) bahwa:

”Pengembangan sektor pariwisata disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : pertama adalah karena makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu lalu. Kedua, prospek pariwisata yang terus memperlihatkan kecenderungan secara konsisten. Dan ketiga, karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia”.

Dalam pengembangan sektor pariwisata daerah, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat memacu keberhasilan program

pariwisata yang sedang dikembangkan. Kebijakan pemerintah disebut dengan Sapta Kebijakan Pariwisata. Adapun 7 butir Sapta Kebijakan Pariwisata (Mussanef, 1995 : 37) adalah :

1. Promosi digencarkan
2. Aksesibilitas diperluas
3. Mutu produk dan pelayanan dimantapkan
4. Kawasan pariwisata dikembangkan
5. Wisata bahari digalakkan
6. Sumber daya manusia ditingkatkan
7. Sadar wisata dan sapta pesona dibudayakan

Pengembangan sektor pariwisata memberikan banyak keuntungan karena manfaat yang dihasilkan cukup besar. Tetapi disisi lain pengembangan sektor pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata, akan memperluas kesempatan kerja dan mendorong berkembangnya industri penunjang kegiatan pariwisata. Sektor pariwisata membuka lapangan kerja sehingga banyak menyerap tenaga kerja mulai dari kegiatan transportasi, akomodasi dan perhotelan, sampai penyediaan makanan dan minuman, serta biro perjalanan dan sebagainya. Sehingga walaupun sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, namun tidak boleh memandang dan menilai sektor pariwisata dari satu aspek semata.

Dalam rangka menyambut pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, Kabupaten Bantul terus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari sektor pariwisata. Kabupaten Bantul memiliki berbagai macam potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam arti luas yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah ( PAD ) Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan berusaha dengan berbagai kiat untuk mengembangkan dan mengelola kepariwisataan melalui Program Pengembangan Produk Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

27 Mei 2006 gempa bumi yang mengakibatkan obyek wisata favorit di Bantul sepi dikunjungi oleh pengunjung. Wisatawan lokal masih menganggap bahwa obyek wisata di Bantul masih ditutup atau tidak boleh dikunjungi. "Anggapan itu tidak benar, karena tidak satu-pun obyek wisata ditutup, masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan wisata di Bantul," ujar Drs Bambang Sugiantoro Kasubdin Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, saat jumpa pers di kantornya, ([www. Pemkab.bantul.go.id](http://www.Pemkab.bantul.go.id)) Rabu (16/8).

Sektor industri memang bukan satu-satunya sumber pemasukan kas daerah Bantul. Sumber lain yang tak kalah potensialnya, yakni sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini-termasuk perdagangan, hotel, dan restoran baru mampu memberi kontribusi sebesar 16,22 % bagi kegiatan ekonomi Bantul pada tahun 1999. Pada tahun 1998-2004 sektor pariwisata telah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,19 %. (*Sumber: PDRB Kabupaten Bantul 1998-2004, BPS Kab. Bantul dan Bappeda Kab. Bantul*).

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantul diarahkan untuk membuat pariwisata menjadi sektor andalan dalam meningkatkan PAD (pendapat asli daerah). Tahun 2000, kontribusi dari pariwisata terhadap PAD sebesar Rp 1,788 milyar dan ditargetkan pada tahun 2004 menjadi Rp 5 milyar. Sasaran lain dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dari 2.517 orang per bulan pada tahun 2000 menjadi 2.726 orang per



bulan di tahun 2004. Sedangkan wisatawan nusantara dari 123.350 orang per bulan di tahun 2000 menjadi 134.100 orang per bulan di tahun 2004.

Kabupaten Bantul memiliki berbagai obyek wisata yang menarik, baik wisata alam, obyek wisata buatan maupun petilasan bersejarah. Selain memiliki pemandangan alam yang menawan banyak obyek wisata yang memiliki nilai spiritual dan mitos bagi masyarakat Jawa. Wisata alam pantai selatan masih menjadi tujuan favorit wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengembangkan sektor wisata. Dengan mengembangkan kawasan wisata baru seperti Pasar Seni Gabusan, mengembangkan wisata minat khusus dan membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Selain itu Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata budaya. Masyarakat Bantul secara turun-temurun berpegang teguh pada adat dan budaya Jawa yang adiluhung. Berbagai kiat untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Produk Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata. Program pengembangan produk pariwisata antara lain dalam bentuk kegiatan: pengembangan fisik obyek wisata, penambahan daya tarik wisata, penyusunan RDTOW kawasan pantai selatan, pembentukan desa wisata dan kerajinan, mendorong sektor swasta di bidang kepariwisataan dan lain-lain.

Sedangkan untuk program pemasaran pariwisata dalam bentuk kegiatan: peningkatan daya tarik dan informasi pariwisata, sosialisasi program wisata Kabupaten Bantul, promosi wisata keluar daerah dan pelaksanaan event-event wisata.

Kenyataan itu menunjukkan Bantul yang pernah memiliki 26 desa tertinggal pada tahun 1994/1995 sekitar 35 persen dari 75 desa yang ada-belum mampu menghidupi daerahnya sendiri. Selain itu, dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, Bantul tergolong paling kecil dalam nilai pendapatan per kapitanya. Tahun 1999, pendapatan per kapita penduduk Bantul sebesar Rp 2,6 juta atau baru sekitar separuhnya dari rata-rata nasional yang Rp 4,8 juta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 5,8 juta. Bila melihat potensi ekonomi Bantul yang demikian kaya, sesungguhnya mustahil Bantul tak mampu menghidupi daerahnya sendiri. Potensi sumber daya alam dan manusia kabupaten ini terbilang melimpah.

Lalu bagaimana upaya Pemerintah kabupaten Bantul menyiasati dan menggali potensi yang berlimpah itu bagi tambahan kas daerahnya?

Menyadari akan kompleksnya pengaruh yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata, maka pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul memerlukan strategi perencanaan yang terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan sumber daya yang memadai serta mendapat dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Soemardjan yang dikutip oleh Spillane (1994 : 133) yang menyatakan bahwa :

“Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan berencana dan menyeluruh, baik dari segi ekonomi, social dan kultural. Perencanaan tersebut mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara. Disamping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata”.

Dengan adanya pola pengembangan pariwisata secara menyeluruh dan terencana seperti yang dijelaskan diatas, maka diharapkan pengembangan sektor pariwisata kabupaten Bantul benar-benar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungannya.

Menyadari begitu pentingnya peranan sektor pariwisata dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam mengenai pengembangan sektor pariwisata dengan judul : PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Suatu Studi Pada Dinas Pariwisata di Kabupaten Bantul-Yogyakarta).

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari hasil pengamatan pendahuluan menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata seperti peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengadaan promosi dan pemasaran produk wisata yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bantul sejauh ini belum memberikan hasil yang memuaskan, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Terbatasnya dana yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul
2. Kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat disekitar obyek wisata
3. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan belum memadai
4. Kurang terpadunya kegiatan pengembangan sektor pariwisata dengan kegiatan pembangunan sektor lain

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas dapat dipahami bahwa majunya suatu daerah tujuan wisata akan ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata daerahnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai pemikiran dan upaya yang lebih intensif dalam pengembangannya. Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang ingin dikaji dan ditelaah adalah :

1. Potensi pariwisata apa saja yang ada di daerah Kabupaten Bantul
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan sektor pariwisata?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang potensi pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan sektor pariwisata
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi sektor pariwisata dalam menunjang Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Bantul

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu wahana dalam menambah dan memperluas wawasan pengetahuan, pemikiran dan pemahaman ilmu pengetahuan dalam hal strategi pengembangan sektor pariwisata

b. Bagi instansi yang terkait

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul

c. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pengembangan sektor pariwisata dan sebagai sumber informasi baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penelitian dengan bidang obyek yang sama dengan kajian yang lebih mendalam

d. Bagi masyarakat umum

Sebagai bahan informasi baru dalam bidang pariwisata dan sebagai promosi pariwisata

#### **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan diuraikan dengan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

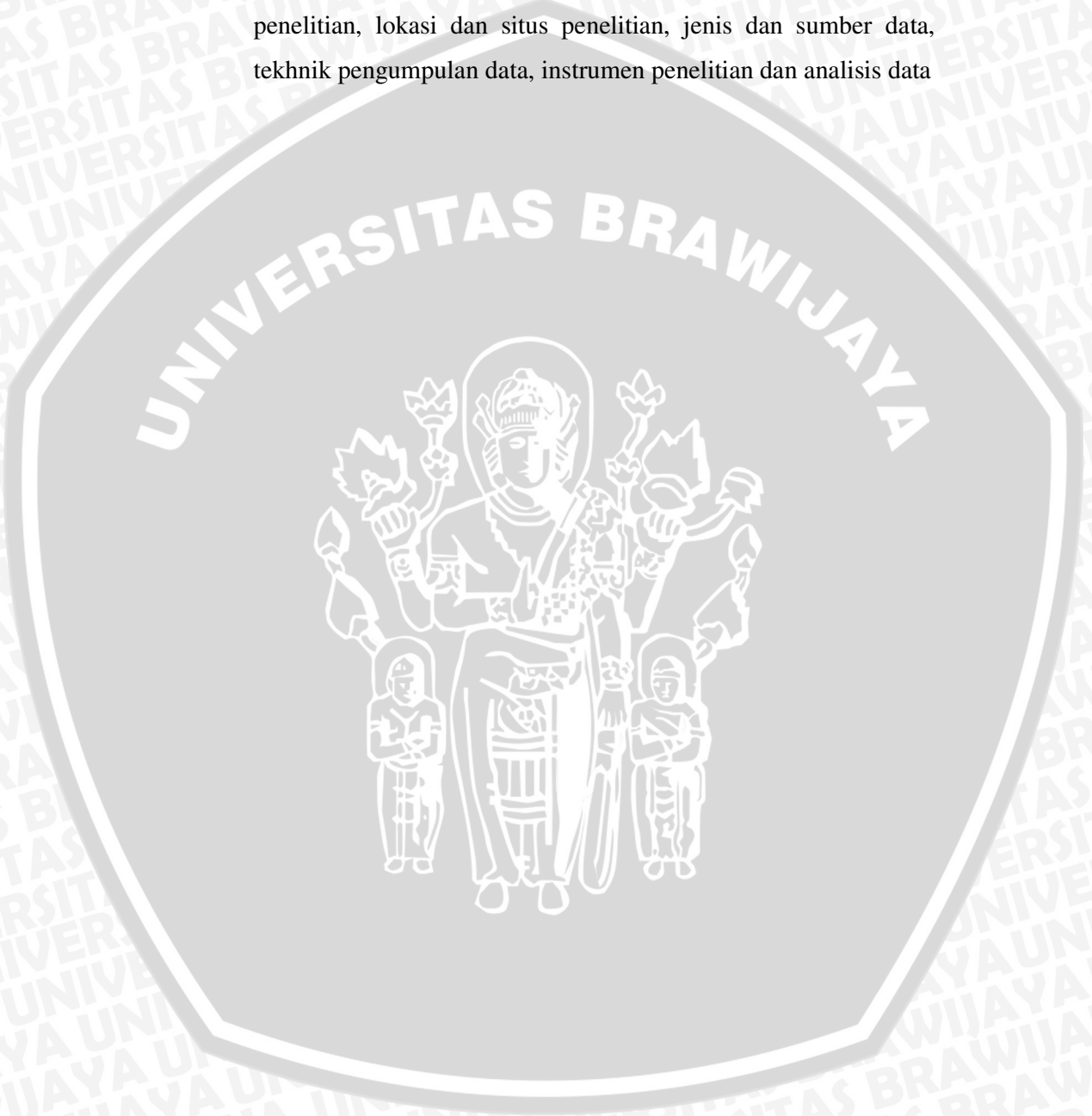
##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Disini dijelaskan mengenai pengertian pariwisata dan wisatawan, macam dan jenis obyek dan daya tarik wisata, jenis sarana dan prasarana pariwisata, peranan industri pariwisata, pemerintahan

daerah, pendapatan asli daerah, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, dan pelayanan publik di bidang pariwisata

### BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai pedoman dalam analisis data, maka diperlukan suatu landasan teoritis yang dianggap relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### A. Pariwisata

##### 1. Pengertian Pariwisata dan Wisatawan

Jenis dan kegiatan pariwisata didunia ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, adalah negara-negara yang tergabung dalam mengelola sektor pariwisata, seperti Hawaii, Karibia, Canary Island dan lainnya. Kedua, adalah negara-negara yang menganggap sektor pariwisata adalah sebuah aktivitas penting atau sektor penting, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapore, USA dan lain-lain. Ketiga, adalah negara-negara yang menganggap sektor pariwisata sebagai sektor pendukung, misalnya Iran, Brunai Darussalam, Saudi Arabia dan lainnya.

Banyak alasan mengapa sebuah negara, khususnya negara yang sedang berkembang merancang suatu kebijakan pariwisata. Disamping alasan yang mendasar bahwa segala sumber daya harus dapat digunakan dan dialokasikan seefisien mungkin, pariwisata juga mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap perekonomian suatu negara. Beberapa alasan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Pariwisata seringkali dianggap sebagai sebuah sumber penting dari pendapatan terhadap nilai tukar mata uang asing ( *hard foreign exchange earning* ).
- b. Sebagai industri ekspor, pariwisata menghadapi aturan perdagangan dari kuota seperti halnya barang-barang pabrik, bahan mentah, dan produk-produk kebutuhan dasar.
- c. Wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam, misalnya kondisi iklim, sejarah, kebudayaan dan sebagainya yang tidak didesain secara khusus.

Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan pariwisata terhadap infrastruktur alam mempunyai *Marginal Cost* yang rendah.

- d. Pariwisata mampu memberikan lapangan kerja baru baik di negara-negara sedang berkembang maupun negara yang sudah maju.
- e. Sebagai sebuah aktivitas campuran untuk memenuhi permintaan akan jasa dan produksi, pariwisata dapat menjadi pendorong bagi produk sektor lain seperti makanan, cinderamata atau souvenir sehingga dibanyak negara terjadi permintaan yang meningkat atas akomodasi dan infrastruktur lainnya.

Berpariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lainnya seperti hanya karena ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena alasan tertentu dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat karena ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha lainnya.

Beberapa Instansi di Indonesia berpendapat bahwa yang disebut Wisatawan hanyalah orang-orang asing yang datang ke Indonesia.

Menurut Schmoll yang dikutip oleh Yoeti (1993 : 127 ) memberikan batasan mengenai Wisatawan sebagai individu atau kelompok individu yang mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanan pada umumnya dengan memotivasi perjalanan yang pernah ia lakukan, tertarik oleh pelayanan yang diberikan oleh suatu daerah tujuan wisata yang dapat menarik pengunjung dimasa yang akan datang.

Dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 1969 dinyatakan : Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan tersebut.

Menurut Liga Bangsa-Bangsa dan IUTO ( *International Union Of Official Travel Organization*) mereka yang disebut Wisatawan adalah :

1. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan atau lainnya.
2. Mereka mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau karena tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah, diplomasi, olahraga dan lain-lain).

Perserikatan Bangsa-bangsa, ICAO ( *International Civil Aviation Organization*) dan Konvensi New York, tidak dapat menerima batasan pariwisata dari Liga Bangsa-bangsa. Hal pembeda yang dipertentangkan adalah mengenai batas waktu tinggal maksimal dinegara yang dikunjungi, yaitu masing-masing 3 bulan dan 6 bulan. Secara konkrit batasan Wisatawan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa adalah setiap orang yang datang ke suatu negara bukan karena alasan untuk migrasi dan yang paling sedikit 24 jam serta paling lama 6 bulan dalam tahun yang sama. (Spillane, 1994 : 27).

Sedangkan pengertian Kepariwisataan menurut Buchli yang dikutip Yoeti (1993 : 107) adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dan seseorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang diperlukan untuk maksud tersebut. Dalam buku yang sama, kritik Morgenroth memberi batasan kepariwisataan (dalam arti sempit) sebagai lalu lintas orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu berpesiar ke tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi hidupnya yang beraneka ragam dari pribadinya.

Selanjutnya Menurut Mussanef (1995 : 15) menyatakan bahwa :

”Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi, melihat dan



menyaksikan atraksi wisata ditempat lain untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam” yang mencakup :

- a. Keseluruhan fenomena alam atau buatan manusia yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata.
- b. Kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisata dalam melakukan aktivitas perjalanan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pariwisata pada dasarnya mengandung 5 unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnnya. Adapun 5 unsur tersebut adalah unsur Manusia (pelaku), unsur Kegiatan (perjalanan), unsur Motivasi (menikmati), unsur Sasaran ( obyek dan daya tarik wisata) serta unsur Usaha.

## 2. Macam dan Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata

Dalam dunia pariwisata istilah obyek dan daya tarik wisata mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau calon wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dapat berupa obyek wisata alam, budaya atau sejarah, tata hidup dan sebagainya, yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi atau menjadi sasaran bagi wisatawan.

Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan dari jenis-jenis pariwisata tersebut harus dibedakan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan kebijakan apa yang dapat mendukung sektor pariwisata tersebut.

Potensi-potensi wisata yang berbeda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain dipengaruhi oleh letak geografis dari kawasan wisata tersebut. ( Pendit, 1994 : 67).

Hamid (1996 : 36) mengkategorikan pariwisata menurut jenisnya sebagai berikut :

- a. Pariwisata Pelancongan ( *pleasure tourism* )

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang pergi untuk berlibur guna menghirup udara baru, melepas keingintahuan ( *curiosity*), untuk santai, melihat sesuatu yang baru, menikmati pemandangan indah, menikmati kesenian orang lain, keindahan kota dan lain-lain.

b. Pariwisata Rekreasi ( *recreational tourism* )

Tipe pariwisata ini bertujuan untuk beristirahat, memulihkan ketegangan, dan kelelahan fisik maupun rohani, misalnya karena kesibukan-kesibukan pekerjaan atau mundurnya kesehatan. Pada umumnya mereka pergi ke pantai, ke laut, daerah pegunungan, atau tempat peristirahatan dimana dapat hidup dengan tenang untuk beberapa waktu.

c. Pariwisata Budaya ( *cultural tourism* )

Tujuan dari pariwisata ini antara lain karena rasa ingin tahu dan ingin mempelajari suatu kebudayaan masyarakat tertentu, misalnya mempelajari tentang adat kebiasaan suatu suku bangsa, organisasi dan cara hidup masyarakat lain/asing, mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan modern, art galeri, pusat-pusat agama yang besar dan ikut serta dalam festival-festival kesenian dan kebudayaan masyarakat.

d. Pariwisata Olah Raga ( *sport tourism* )

Jenis pariwisata ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Pariwisata olah raga yang besar, seperti Olympiade, pertandingan tinju dunia, ASEAN GAMES dan olah raga lain yang bersifat internasional. Yang datang berkunjung pada peristiwa itu tidak terbatas pada olahragawan saja, akan tetapi orang-orang yang senang menonton pertandingan itu sendiri ataupun pendukungnya.

2. Sport bagi wisatawan, kegiatan olah raga ini benar-benar dilakukan oleh wisatawan yang senang mendaki gunung, berburu dan memancing (*hunting dan game fishing*), menunggang kuda ( *horseback riding* ), ski dan lainnya

e. Pariwisata Bisnis ( *business tourism* )

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa perjalanan untuk melakukan niaga tidak dapat dimasukkan sebagai perjalanan wisata, akan tetapi sebagai profesional travel tujuannya adalah mencari keuntungan atau mencari nafkah. IUTO sebagai organisasi pariwisata internasional memasukkan orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk niaga sebagai salah satu jenis dari perjalanan wisata.

f. Pariwisata Konvensi ( *convention tourism* )

Tipe pariwisata ini merupakan tipe yang paling mudah dikembangkan, tetapi telah berkembang dengan pesat. Tujuan wisatawan ini adalah untuk menghadiri konferensi-konferensi internasional atau konferensi yang bersifat nasional dan bisnis konferensi. Konferensi ini sering dihadiri oleh beribu-ribu peserta yang tinggal untuk beberapa hari di kota kecil ataupun kota besar dimana konferensi itu diselenggarakan.

Selain itu Pendit (1994 : 34) juga mengklasifikasikan jenis pariwisata yang sudah dikelompokkan yaitu :

- a. Wisata cagar alam : jenis wisata ini terkait dengan kegemaran akan keindahan alam, hawa udara segar pegunungan, keajaiban hidup binatang-binatang dan marga satwa yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang tumbuh di tempat lain.
- b. Wisata budaya : tujuannya adalah ingin memperluas pandangan hidup dan kunjungan ke tempat lain untuk ke luar negeri, mempelajari keadaan masyarakat setempat, kebiasaan dan adat istiadat, budaya dan kesenian daerah.
- c. Wisata pertanian : mengandalkan perjalanan proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, pembibitan, sambil menikmati segarnya aneka ragam tanaman.
- d. Wisata bahari : wisata yang dihubungkan dengan olahraga air atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam, selancar, melihat tanaman laut serta berbagai rekreasi perairan lainnya.
- e. Wisata kesehatan : keperluan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani yang mengunjungi tempat peristirahatan, seperti air panas yang mengandung mineral, iklim yang sejuk dan menyehatkan.
- f. Wisata komersial : mengadakan perjalanan mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dengan dimeriahkan berbagai atraksi seni.
- g. Pilgrim : dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat dengan cara mengunjungi tempat suci, makam orang besar, pemimpin yang diagungkan, tempat penuh legenda, bukit atau gunung yang dianggap keramat.

Sedangkan jenis-jenis pariwisata menurut Ndaru (1983 : 07) digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Ketinggian nilai budaya : berupa keindahan kesenian seperti seni ukir kayu, kulit maupun logam, seni batik dan songket, seni tari, seni musik tradisional yang kesemuanya tiap daerah memiliki keanekaragaman corak. Selain itu juga dapat berwujud peninggalan sejarah berupa candi-candi, pura maupun keraton warisan adat-istiadat maupun seni kehidupan asli setempat yang berbeda-beda.
2. Keindahan alam : berupa deburan ombak, pasir putih, kerang laut, tanah laut, perumahan berundak-undak, gunung berapi, sumber air panas, air terjun dan macam-macam makanan khas daerah.

Kekayaan alam dan keindahan alam yang dimiliki oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia seperti yang digambarkan diatas merupakan suatu sumber terbesar yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata dimana dapat menarik minat para wisatawan baik asing maupun wisatawan domestik untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata tersebut. Sehingga apabila seluruh potensi tersebut dikembangkan dengan optimal maka dengan sendirinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata itu sendiri.

## **B. Jenis Sarana Dan Prasarana Pariwisata**

### **1. Sarana Pariwisata**

Menurut Yoeti (1993 : 179) sarana kepariwisataan adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi hidup dan penghidupannya tidak selamanya tergantung pada wisatawan.

Yoeti memberikan pengertian pengertian sarna kepariwisataan yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung, hidup dan penghidupannya tidak selamanya bergantung pada kunjungan wisatawan (Yoeti , 1993 : 184 ).

Kemudian menurut Pendit ( 1994 : 73 ) membedakan sarana pariwisata menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Sarana pokok pariwisata

Perusahaan yang hidup dan Sangay tergantung pada lalu lintas wisatawan. Yang termasuk sarana pokok tersebut adalah : sarana perhubungan, sarana angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, obyek wisata dan atraksi wisata.

b. Sarana pelengkap pariwisata

Yaitu fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah yang dikunjunginya. Yang termasuk sarana pelengkap itu tersebut meliputi fasilitas olah raga dan sarana ketangkasan.

c. Sarana penunjang kepariwisataan

Yaitu fasilitas-fasilitas yang diperlukan wisatawan yang berfungsi tidak hanya melengkapi sarana pokok tetapi agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi. Yang termasuk sarana penunjang adalah : Night Club, souvenirshop, bioskop dan fasilitas lainnya yang membuat wisatawan betah di tempat obyek wisata

## 2. Prasarana Pariwisata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989 : 696) pengertian prasarana adalah "segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses".

Sedangkan Yoeti ( 1993 : 170) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan prasarana pariwisata adalah : "semua fasilitas yang dapat memproses perekonomian berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan".

Dari pengertian tersebut Yoeti (1993 : 181) menyimpulkan bahwa yang termasuk prasarana pariwisata dalam hal ini adalah :

1. Prasarana Perekonomian, yang termasuk di dalam prasarana perekonomian adalah :

- a) Prasarana angkutan, adalah pengangkutan yang dapat membawa para wisatawan dari tempat tinggalnya ke daerah tujuan wisata. Misalnya bus, kapal laut, pesawat udara, kereta api, taxi, dan travel.
- b) Prasarana komunikasi, termasuk dalam kelompok ini adalah : radio, telegram, telepon, pelayanan kantor pos dan surat kabar atau majalah.

- c) Sistem Perbankan, adanya tempat penukaran mata uang asing.
  - d) Kelompok yang termasuk utilitis, yang termasuk dalam kelompok ini adalah : penerangan listrik, persediaan air minum dan sumber air.
2. Prasarana Sosial, yaitu semua faktor-faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Yang termasuk prasarana sosial adalah :
- a) Sistem pendidikan, yaitu adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pendidikan kepariwisataan.
  - b) Pelayanan kesehatan, yaitu adanya jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin akan diderita wisatawan, misalnya : rumah sakit
  - c) Faktor keamanan
  - d) Petugas yang langsung melayani wisatawan, seperti polisi, pramuwisata, petugas kesehatan dan lainnya.

### **C. Peranan Industri Pariwisata**

Pariwisata mulai dikenal oleh banyak orang setelah ada Keputusan Presiden pada tanggal 9 Agustus 1964 dengan istilah industri pariwisata. Berdasarkan hal tersebut di Indonesia mulai diadakan upaya pengembangan industri pariwisata agar tujuannya tercapai. Sejalan dengan hal tersebut menurut Yoeti ( 1997 : 70 ), “Tujuan dari industri pariwisata adalah sebagai berikut

1. Menarik investor asing agar mau menanamkan modal
2. pariwisata sebagai bagian dari sektor industri

Batasan pariwisata sebagai sektor industri mengarah pada pengertian luas yaitu bahwa industri pariwisata merupakan serangkaian kegiatan aktivitas dari berbagai bidang usaha yang melayani jasa dan nantinya akan sangat diperlukan oleh wisatawan, dimana diantara unit usaha yang satu dengan lainnya saling berkaitan.

Sedangkan menurut Darmadjati ( 1975 : 24 ) memberikan batasan industri pariwisata sebagai berikut : ”industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama-sama menghasilkan

produk maupun jasa atau layanan dan service yang nantinya akan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan wisatawan selamanya”.

Dari pengertian diatas, menunjukkan bahwa industri pariwisata bukanlah jenis industri yang berdiri sendiri. Industri tersebut membutuhkan kerjasama keterkaitan antara bidang usaha yang lain. Bidang usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata adalah :

1. Travel Agent / Tour Operation
2. Perusahaan pengangkutan
3. Akomodasi Perhotelan
4. Bar dan Restoran
5. Souvenir Shop

Selain itu peranan industri pariwisata juga berpengaruh pada beberapa sektor lain yaitu :

1. Bidang tenaga kerja  
Menyerap tenaga kerja karena memberikan dan menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat.
2. Bidang sosial budaya  
Hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan penduduk asal tempat wisata tersebut, akan mempengaruhi pola hidup baru.

#### **D. Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah:”pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan pemerintah

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula sebagai wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten atau Kota. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu juga perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu



membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing satu dan yang lain dalam menjalankan tugasnya.

#### 1. Desentralisasi

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selanjutnya menurut Kaho (1991 : 9) mengatakan bahwa alasan diberlakukannya asas desentralisasi adalah : "Demi tercapainya efektifitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grass roots democracy*).

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut diatas ditempuh melalui mekanisme penyerahan atau pengakuan atas usul daerah terhadap pembagian urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya.

#### 2. Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian dalam Kaho (1991 : 60) menyatakan bahwa: "Daerah Otonom diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah hak, wewenang, kewajiban, kemandirian yang dimiliki oleh daerah, tetapi bukan kemerdekaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keberadaan daerah kabupaten atau kota sebagai daerah otonom pada dasarnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga
2. Urusan rumah tangga daerah diatur/diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kewajiban daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup memadai agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, Kaho (1991 : 80)

Mengelindingnya tuntutan desentralisasi merupakan suatu proses yang terjadi oleh tekanan masyarakat untuk reformasi di bidang politik dan ekonomi ini dilakukan sebagai respon terhadap penerimaan pusat yang dipandang tidak adil dalam manajemen negara yang pluralistik.

Kaho (1991 :12-24) mengemukakan beberapa keunggulan dari desentralisasi maupun otonomi daerah, yaitu :

- a. Lembaga-lembaga daerah lebih fleksibel dibandingkan lembaga-lembaga yang tersentralisasi oleh karena mampu tanggap secara tepat terhadap lingkungan atau kebudayaan masyarakat setempat berubah
- b. Lembaga yang terdesentralisasi lebih efektif dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang tersentralisasi. Para pejabat di daerah lebih dekat dengan berbagai permasalahan dengan peluang di daerah oleh karena dapat mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu
- c. Lembaga-lembaga di daerah lebih inivatif dibandingkan dengan lembaga-lembaga pusat

- d. Lembaga-lembaga di daerah lebih memiliki moral, komitmen dan produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga pusat.
- e. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- f. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu lagi instruksi dari pemerintah pusat
- g. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap kepentingan segera dapat dilaksanakan.
- h. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara

Dari kutipan diatas terdapat implikasi dari otonomi daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis
2. Pemerintah daerah lebih dapat mengoptimalkan konsep *reinventing government* (mewirauasakan pemerintah) yang selama pemerintah orde baru sangat mendominasi kepentingan pemerintah pusat.
3. Optimalisasi berbagai potensi daerah yang selama ini belum tergarap.
4. Terciptanya sikap inisiatif dan kreatifitas aparatur pemerintahan daerah yang selama ini menunggu petunjuk dari atasan
5. Terciptanya sikap hidup mandiri.
6. Terciptanya supremasi hukum
7. Terjaminnya Hak Asasi Manusia
8. Terbinanya sistem politik yang demokratis
9. DPRD menjadi lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat
10. Meningkatnya kesejahteraan rakyat di daerah

Kaho (1991 : 14) mengemukakan pendapatnya mengenai kekurangan otonomi daerah, yaitu :

1. Karena bertambahnya organisasi pemerintah maka struktur pemerintah bertambah kompleks koordinasi
2. Keseimbangan dan keserasian antar bermacam-macam kepentingan dengan daerah dapat lebih mudah terganggu
3. Khususnya mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya yang disebut dengan daerahisme atau provinsiisme
4. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

## E. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan hasil usaha sendiri sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengurus pengelolaan jenis-jenis sumber dana yang termasuk dalam pendapatan asli daerah, agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Berkaitan dengan pengertian diatas maka dalam pasal 157 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  - 1) Hasil Pajak Daerah
  - 2) Hasil Retribusi Daerah
  - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Non Asli Daerah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang disebutkan diatas, salah satunya bersumber dari sektor pariwisata. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor wisata adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Perusahaan Daerah yang bergerak disektor pariwisata meliputi :

- a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo ( 1989 : 30 ) yang dimaksud Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan

oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut”

Menurut UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah :

” Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah, yang sifatnya wajib bagi pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan (prestasi) secara langsung dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga masing-masing daerah.

Pajak Daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah :

1) Pajak Pembangunan I

Yaitu pajak yang berasal dari pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang disediakan khusus bagi orang-orang untuk beristirahat, menginap, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran dan rumah makan adalah tempat menikmati makanan dan minuman yang disediakan dengan memungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan katering. Berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 1997, yang menjadi subyek pajak adalah pengusaha rumah makan atau restoran dan hotel tersebut. Dan tarif pajak yang ditetapkan adalah 10 % untuk yang makan di restoran maupun yang menginap di hotel.

2) Pajak Pertunjukan, Hiburan dan Keramaian Umum

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak yang dikenakan pungutan sebesar 10 % dari karcis masuk bagi pertunjukkan atau hiburan dan keramaian umum dalam bidang olah raga, serta sebesar 15 % bagi pertunjukan keramaian yang bersifat seni atau budaya.

#### b. Retribusi Daerah

Menurut Ichsan dan Ratih (1989 : 34 ):

”Retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada seseorang atau badan hukum yang telah menikmati barang dan jasa dari Pemerintah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1957 dinyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah ” pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akibat jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau adanya prestasi langsung yang di dapat. Jasa yang dimaksud dikelompokkan menjadi 2 golongan : jasa umum yaitu jasa untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, dan jasa usaha yaitu jasa yang menganut prinsip komersil dan perijinan tertentu seperti kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Retribusi Daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah :

- 1) Retribusi penggunaan tempat rekreasi atau obyek wisata dan taman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Retribusi yang dikenakan pada pengunjung dengan besar tarif berdasarkan ketentuan daerah.
- 2) Retribusi parkir di tempat obyek pariwisata, yaitu retribusi yang dikenakan pada pengunjung obyek pariwisata atau tempat rekreasi yang memarkir kendaraan di lokasi tersebut. Retribusi ini dikenakan dengan besar tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah

#### F. Pengembangan Pariwisata

Menurut Mussanef (1995 : 1), bahwa pengembangan pariwisata adalah ”segala kegiatan dari usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan, semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang digunakan untuk melayani kebutuhan wisatawan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan sektor pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke daerah tujuan wisata.

Kegiatan dari usaha pariwisata tersebut adalah :

- a. Kegiatan usaha yang dihubungkan dengan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam. Obyek dan daya tarik wisata budaya dan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- b. Usaha yang berhubungan dengan menyediakan sarana dan prasarana wisata seperti penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, jasa biro perjalanan, penginapan, perhotelan, souvenir dan lainnya.
- c. Usaha lain yang terkait dengan kegiatan pengembangan sektor pariwisata seperti pengembangan Sumber Daya Manusia, upaya promosi dan pemasaran produk pariwisata. (Mussanef, 1995 : 1)

Kegiatan pariwisata tersebut diatas menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana serta faktor penunjang lainnya yang disediakan dan diadakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya pengaturan, pengurusan dan pelayanan yang baik dan memadai sesuai yang dibutuhkan wisatawan.

Pengembangan pariwisata akan dapat memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi pembangunan nasional apabila dilakukan secara menyeluruh, lebih terencana dan terkendali. Sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Perencanaan pembangunan pariwisata harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik sosial dan budaya dari suatu negara. Selain itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Upaya pengembangan sektor pariwisata harus memperhatikan Pedoman Dasar Pengembangan Pariwisata, Spillane (1994 : 134) :

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga seluruh segi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan sektor lain.

2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial suatu negara. Karena pengembangan pariwisata saling berkait dengan sektor lain dan dapat mempengaruhi pembangunan sektor lain.
3. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
4. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan, sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu negara.
5. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin. Sedapat mungkin harus menampakkan perubahan-perubahan sosial yang positif.

Disamping itu, peran lingkungan dalam pengembangan pariwisata sangat besar dan mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Dengan mengembangkan pariwisata berarti mengembangkan suatu industri. Sebagai suatu industri pariwisata mempunyai produk-produk yang beraneka ragam yang dapat dijual seperti tari-tarian tradisional, keindahan alam, keunikan budaya, kerajinan masyarakat dan lingkungan alam. Dengan demikian lingkungan sangat berperan dalam dalam kepariwisataan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengembangan pariwisata.

Dapat kita sadari bahwa tanpa lingkungan yang baik tak mungkin pariwisata dapat berkembang. Karena itu pengembangan pariwisata harus memperhatikan mutu lingkungan, sebab dalam industri pariwisata lingkungan itulah yang sebenarnya dijual. Dengan dikembangkannya pariwisata, kemungkinan terjadi pencemaran sangatlah besar, hal itu disebabkan oleh banyaknya kendaraan, kurang sadarnya wisatawan membuang sampah sembarangan, pencemaran yang ditimbulkan oleh asap kendaraan, kerusakan peninggalan bersejarah karena ulah wisatawan yang tidak bertanggung jawab.

Pengembangan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan pembangunan obyek beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan



mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada. Misalnya membangun rumah makan atau restoran, hotel, biro perjalanan, toko souvenir dan lainnya di sekitar obyek wisata.

Dalam rangka pengembangan obyek dan daya tarik wisata menurut Mussanef (1995 : 176 ), perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Layak finansial

Yaitu studi kelayakan dimana harus memenuhi kriteria komersil dengan membandingkan biaya operasional dan hasil usaha untuk mengembangkan modal.

2. Layak sosial ekonomi

Yaitu suatu kelayakan dengan memperhatikan perbandingan ratio bagi pembangunan obyek wisata dibanding dengan pembangunan ekonomi

3. Layak teknis

Dimana obyek wisata tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak

4. Layak lingkungan

Analisis Dampak Lingkungan, bahwa apabila dampak kegiatan lingkungan tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi yang lebih besar dibanding dampak positifnya maka instansi yang bersangkutan dapat menolak rencana kegiatan pengembangan tersebut.

Pada intinya, pengembangan obyek dan daya tarik wisata harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta, dan dukungan sera partisipasi masyarakat agar tercapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menurut Mussanef ( 1995 : 178 ) terdiri atas :

1. Pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung antara lain kenyamanan, keindahan, kebersihan, kelestarian dan nilai-nilai sesuai dengan kebutuhan operasional.

2. Pengembangan pelaksana pariwisata yang terdiri dari manusia, bentuk organisasi dan tata kerja serta prosedur yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Sehubungan dengan uraian diatas maka dalam pengembangan sektor pariwisata disamping harus berorientasi pada keuntungan yaitu dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga harus memperhatikan studi kelayakan yang harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah, swasta dan juga partisipasi masyarakat setempat.

### **G. Pelayanan Publik di Bidang Pariwisata**

Dalam strategi pengembangan obyek wisata, tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh pengelola obyek wisata tersebut kepada masyarakat. Menurut Sianipar (1998- 7 ) Pelayanan Publik adalah ”bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pelaku bisnis, BUMN atau BUMD dan swasta dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Thoha ( 1995 -42) Pelayanan Publik adalah ”usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurunnya citra kepariwisataan Indonesia, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri disebabkan oleh beberapa hal seperti : (1) gangguan keamanan merupakan hal mendasar yang merusak citra dan berdampak sangat merugikan bagi industri pariwisata maupun masyarakat umum. Stigma teroris yang berada di Indonesia diterima sebagian negara sebagai hal yang sangat negatif.

*Travel warning* yang dikeluarkan negara maju yang memiliki potensi wisatawan berdampak pada merosotnya wisatawan dan pemasok produk-produk wisata yang dikelola oleh masyarakat (usaha mikro) dan menurunnya investasi bidang pariwisata, terbatasnya sumber daya manusia di bidang pariwisata mempengaruhi pula pengembangan pariwisata nasional di samping keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah untuk pengembangan pariwisata, walaupun objek tujuan wisata tersebar luas di kawasan nusantara, namun kesenjangan pembangunan pariwisata antar daerah cukup tajam, partisipasi masyarakat belum

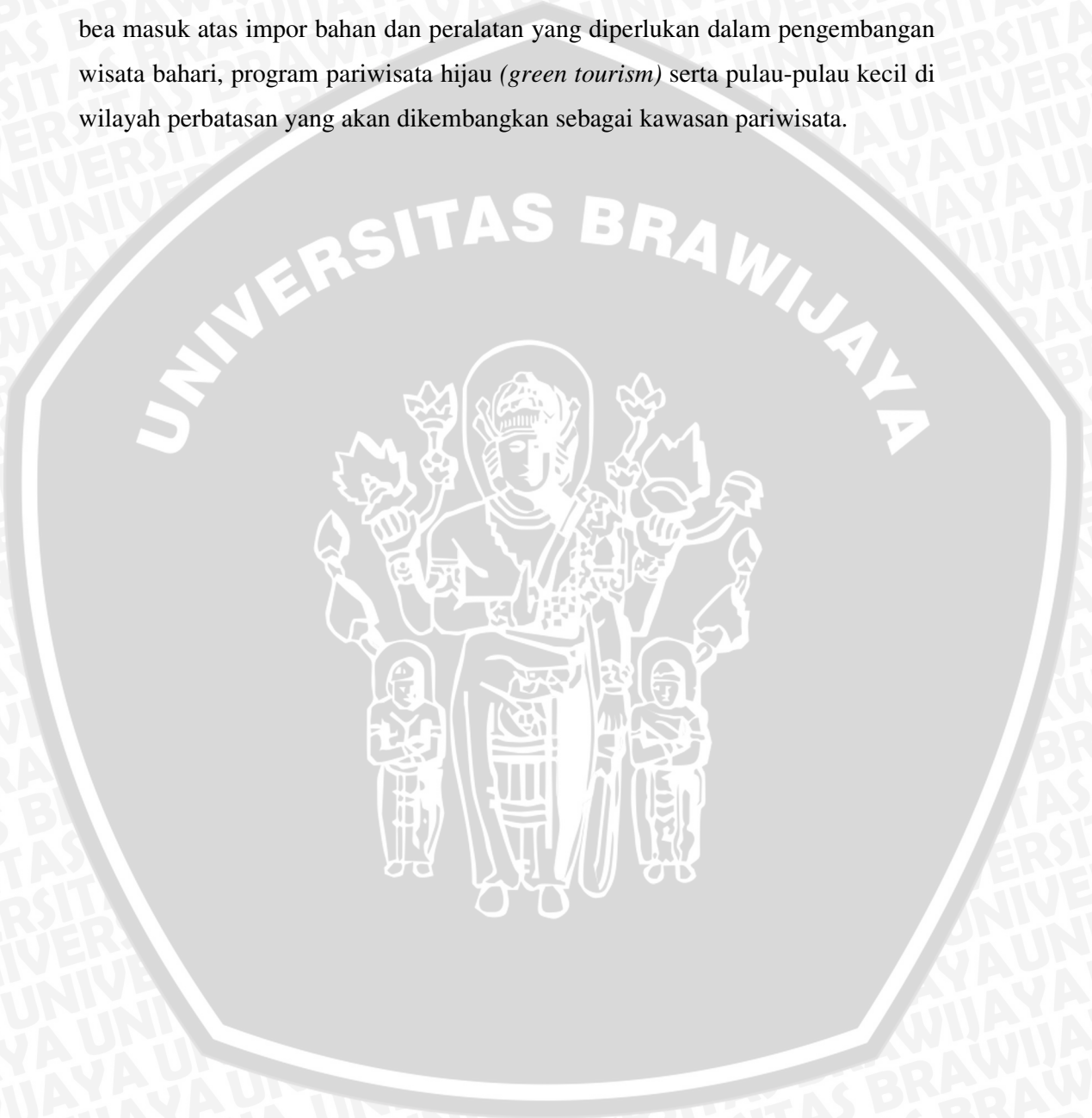
sepenuhnya mendukung pengembangan pariwisata, di samping itu pengembangan kepariwisataan masih berorientasi pada wisatawan mancanegara, sehingga pengembangan wisatawan nusantara kurang mendapat perhatian yang memadai.

Kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menjelaskan kinerja organisasi dalam melayani masyarakat dan para wisatawan. Oleh karena itu pelayanan publik yang menjadi salah satu fungsi dan tugas utama pemerintah daerah harus ditingkatkan kualitasnya seiring dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan jaman. Kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kekuasaan pada beberapa tahun yang lalu telah membentuk sikap dan perilaku birokrasi yang cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya di mata publik. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pariwisata harus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya ke arah pelayanan masyarakat yang responsif dan sensitif terhadap kepentingan masyarakat dan para wisatawan yang datang, sehingga *"image"* pemerintah di mata masyarakat dapat dibangun kembali. Kualitas pelayanan publik tidak hanya memiliki keterkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas pelayanan tetapi juga sangat terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dapat dilakukan beberapa hal dalam meningkatkan kinerja pemerintah di bidang pariwisata. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia, kedua : Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan

dan pemeratakan pembangunan, ketiga : secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata, keempat : meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata; memberikan keringanan bea masuk atas impor bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pengembangan wisata bahari, program pariwisata hijau (*green tourism*) serta pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Pembuatan rancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan dan menemukan penyelesaian dari permasalahan tersebut secara ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk mempermudah penulisan dan penyelesaiannya.

Ismani dan Suyadi (1987 : 23 ), berpendapat bahwa penelitian itu adalah "Segala aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan fakta-fakta dalam masyarakat, kelakuan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha-usaha menanggapi hal-hal tersebut".

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian cara-cara yang diperoleh untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia dan alam serta hubungannya satu dengan yang lain guna menentukan metode-metode untuk memecahkan masalah yang dihadapi

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif yaitu: "suatu jenis penelitian yang biasanya dilakukan tanpa suatu hipotesa tertentu yang telah dirumuskan secara ketat. Kalaupun menggunakan hipotesis tetapi tidak diuji secara sistematis". (Singarimbun dan Effendi, 1987 : 4 ).

Sedangkan menurut Nazir ( 1988 : 63 ) penelitian adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan Taylor (Moleong, 2000 :3), metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan demikian penelitian berupaya untuk mendeskripsikan, menguraikan dan menginterpretasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Serta kemudian dapat diambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul.

## **B. Fokus Penelitian**

Begitu kompleksnya permasalahan dalam strategi pengembangan sektor pariwisata, sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu fokus agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Fokus dapat membantu peneliti menentukan kearah mana penelitiannya akan dibawa.

Banyak hal yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang tersedia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang membutuhkan penanganan serius.

Menurut Bodgan dan Biklen dengan Lincoln dan Guba (Moleong, 2000:7) menyebutkan bahwa : ”penentuan fokus suatu penelitian mempunyai 2 tujuan ; pertama menetapkan fokus, membatasi studi yang berarti bahwa adanya fokus penelitian ditentukan oleh tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi. Inklusi menyaring informasi yang mengalir masuk”.

Adapun fokus penelitian yang diamati adalah :

1. Potensi pariwisata yang berada di Kabupaten Bantul meliputi :
  - a. Potensi wisata alam
  - b. Potensi wisata sejarah
  - c. Potensi wisata budaya

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi :
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
  - b. Peningkatan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata
  - c. Peningkatan peran serta masyarakat masyarakat dan swasta
  - d. Peningkatan promosi dan pemasaran wisata
  - e. Pengembangan kemampuan pegawai sebagai pelaksana
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul :
  - a. faktor pendukung yang terdiri dari:
    - 1) Faktor pendukung internal berupa : letak geografis, kondisi iklim, sarana jalan dan transportasi.
    - 2) Faktor pendukung eksternal berupa : keramah tamahan penduduk dan keamanan, faktor keahlian penduduk, dan UU Kepariwisata Nomor 9 tahun 1990
  - b. faktor penghambat yang terdiri dari:
    - 1) Faktor penghambat internal, berupa :
      - a) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia kepariwisataan di Bantul
      - b) Keterbatasan anggaran
      - c) Terbatasnya sarana dan prasarana dinas
    - 2) Faktor penghambat eksternal, berupa :
      - a) Belum mantapnya koordinasi kebijakan antara pemerintah
      - b) Belum terealisasinya paket wisata jalur barat dan jalur timur
      - c) Lemahnya kekuatan hukum
      - d) Rasa khawatir wisatawan yang berkunjung ke pantai
4. Kontribusi sektor pariwisata dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah dilihat dari :
  - a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
  - b. Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD

### C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Dalam buku penyusunan dan ujian skripsi (1997 : 11) yang dimaksud dengan situs penelitian adalah “ kondisi dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti”.

Adapun yang menjadi lokasi pemilihan adalah Kabupaten Bantul-Yogyakarta. Kabupaten Daerah Bantul memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan sektor pariwisata, industri, perdagangan dan perikanan maupun pertanian. Sektor industri memang bukan satu-satunya sumber pemasukan kas daerah. Masih ada lagi sumber lain yang tak kalah potensialnya, yakni sektor pariwisata. Obyek wisata yang terkenal di daerah ini, antara lain Pantai Parangtritis dan Pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Ada pula Pantai Samas dan Pandan Simo yang merupakan tempat bertapa Pangeran Mangkubumi.

Penentuan atau pemilihan situs penelitian juga memiliki pengaruh positif terhadap hasil penelitian yang akan dicapai nantinya, termasuk pula dalam pengumpulan data hasil penelitian. Dengan adanya situs penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pengumpulan data :

Adapun yang menjadi situs penelitian adalah :

1. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah orang atau organisasi yang dipilih secara sengaja oleh peneliti sebagai nara sumber. Orang-orang atau organisasi yang dipilih tersebut merupakan orang-orang atau instansi pemerintah yang dianggap mengetahui dan menguasai bidang permasalahan.

Selanjutnya dari data tersebut diharapkan hasil penelitian akan dapat dianalisa dan dapat diinterpretasikan dengan baik, disamping itu hasil yang diperoleh bisa dipertanggung jawabkan.

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu :



1. Jenis data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui orang-orang atau organisasi-organisasi pemerintah atau swasta yang dianggap mengetahui atau memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, serta masyarakat setempat.

2. Jenis data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung berhubungan dengan responden yang diteliti dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan, yaitu berupa buku-buku ilmiah dan arsip atau catatan yang berkaitan dengan informasi penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data merupakan usaha yang secara operasional merupakan aspek penting dalam pelaksanaan penelitian, termasuk pula untuk mencapai hasil penelitian yang optimal.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Observasi ( pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui perbuatan mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian secara sistematis dalam rangka melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan dalam upaya memperoleh gambaran langsung mengenai obyek penelitian.

- b) Wawancara

Yaitu suatu teknik penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada sumber penelitian yang dikehendaki. Dimana tanggung jawab tersebut berlangsung secara bebas dan terbuka tanpa meninggalkan etika wawancara yang ada, dan pewawancara tersebut menggunakan alat yang dinamakan interview guide ( panduan wawancara)

c) Dokumentasi

Teknik seperti ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari arsip-arsip, catatan-catatan atau gambaran monografi dari lokasi penelitian. Data ini dapat menjadi data pelengkap dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

1. Peneliti sendiri

Yaitu mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti.

2. Pedoman wawancara

Digunakan sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan orang-orang yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Yaitu catatan penelitian dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan dilakukan dilapangan

## G. Analisis Data

Nasution (1982 : 126) mendefinisikan bahwa analisa data adalah “proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Melakukan analisa adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, daya kreatif dan intelektual tinggi “.

Selanjutnya Patton ( Moleong , 2000 : 103) , analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu uraian.

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16 ) mengemukakan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam proses analisis data antara lain :

1. *Data Reduction* (Reduksi data )

Dalam kegiatan reduksi data ini dilakukan proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan. Abstraksi dan transformasi data mentah yang terdapat didalam buku catatan lapangan. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus dalam keseluruhan perjalanan kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam, menyortir, menetapkan fokus dan mengorganisir data yang telah diperoleh sehingga dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan akhir.

## 2. Penyajian Data ( *Data display* )

Data display adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa data display, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan harus melakukan apa yang didasarkan atas pemahaman tersebut.

## 3. Penarikan kesimpulan ( *Conclusion Drawing* )

Kesimpulan akhir analisa kualitatif ditarik setelah tidak ditemukan lagi data atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan yang telah diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan-catatan lapangan yang ada sehingga diperoleh konsensus yang optimal antara peneliti dengan sumber-sumber data atau informasi.



## BAB IV

### HASIL dan PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data Penelitian

##### 1 Gambaran Umum Kabupaten Bantul

###### a. Keadaan Geografis

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan menyimpan banyak kisah kepahlawanan Proses pembentukan Kabupaten Bantul tidak lepas dari perjuangan Pangeran. Diponegoro mengusir penjajah. Perang Diponegoro pada tahun 1825 – 1830 dengan markas di Selarong memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat di daerah itu dan sekitarnya. Wilayah Bantul juga memiliki kelekatan dengan tradisi, budaya dan religi Kesultanan Yogyakarta. Sebagai contoh, Pantai Selatan di Kabupaten Bantul sangat erat terkait dengan legenda Ratu Kidul, Ratu "penguasa" Samudera Hindia. Kraton Sultan Yogyakarta menghadap langsung ke arah Pantai Selatan ini. Dari arah jalan Malioboro di kota Jogja menuju Selatan, sampailah orang di Bantul, daerah yang dikenal dengan GEPLAK, produk makanan rakyat dan ragam industri kerajinannya.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 wilayah di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Bantul adalah Bantul, yang berjarak sekitar 10 km ke arah Selatan kota Yogyakarta, berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Kabupaten Gunung Kidul
Sebelah Barat	: Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  -  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  -  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km<sup>2</sup> (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY).

### **b. Keadaan Topografi**

Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah daratan (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31.421 Ha (61,99%). Untuk wilayah timur dan barat pada umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1 - 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng diatas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah kecamatan, terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan. Pada umumnya berupa daerah dataran (Kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara Kabupaten Bantul dengan luas 31.421 Ha (61%). Untuk wilayah timur dan barat pada umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1 % - 40% dengan luas 15.148 Ha (30%). Pada sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng diatas 40,1 %. Dengan demikian terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas mempunyai lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri. Sedang wilayah Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan di dominasi lahan datar. Kombinasi keadaan alam ini membuat Bantul memiliki panorama yang indah, dengan suhu udara berkisar antara 20 - 34°C.

### **c. Karakteristik Penduduk**

Penduduk Bantul berjumlah hampir 800.000 jiwa (2003) dengan kepadatan rata-rata sekitar 1.560 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk ini tergolong tinggi dibandingkan kabupaten tetangganya, Kulonprogo dan Gunung Kidul. Dalam tahun 1996-2000, laju pertumbuhan penduduk Bantul rata-rata adalah 0,80%. Diantara penduduknya yang telah bekerja, sekitar 30,7% bergiat di sektor pertanian. Hal itu tampak dari pemanfaatan lahan yang lebih dari 40% (45,8%) adalah untuk pertanian. (Sumber : BPS, 2000)

#### d. Tata Guna Lahan

1. Pekarangan : 18.327,15 Ha (36,16 %)
2. Sawah : 16.823,84 Ha (33,19 %)
3. Tegalan : 7.554,45 Ha (14,90 %)
4. Tanah Hutan : 1.697,80 Ha ( 3,35 %)

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km<sup>2</sup>. Yaitu :

1. Sungai Oyo : 35,75 km
2. Sungai Opak : 19,00 km
3. Sungai Code : 7,00 km
4. Sungai Winongo : 18,75 km
5. Sungai Bedog : 9,50 km
6. Sungai Progo : 24,00 km

#### e. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

##### 1). VISI

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : "BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS".

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi tersebut.

**Produktif** dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

**Profesional** dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

**Ijo Royo-Royo** dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan baik di musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

**Tertib** dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/ perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

**Aman** dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

**Sehat** dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/ manusia yang menghuninya.

**Asri** dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi.

**Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

**Demokratis** dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

**Agamis** dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.

Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

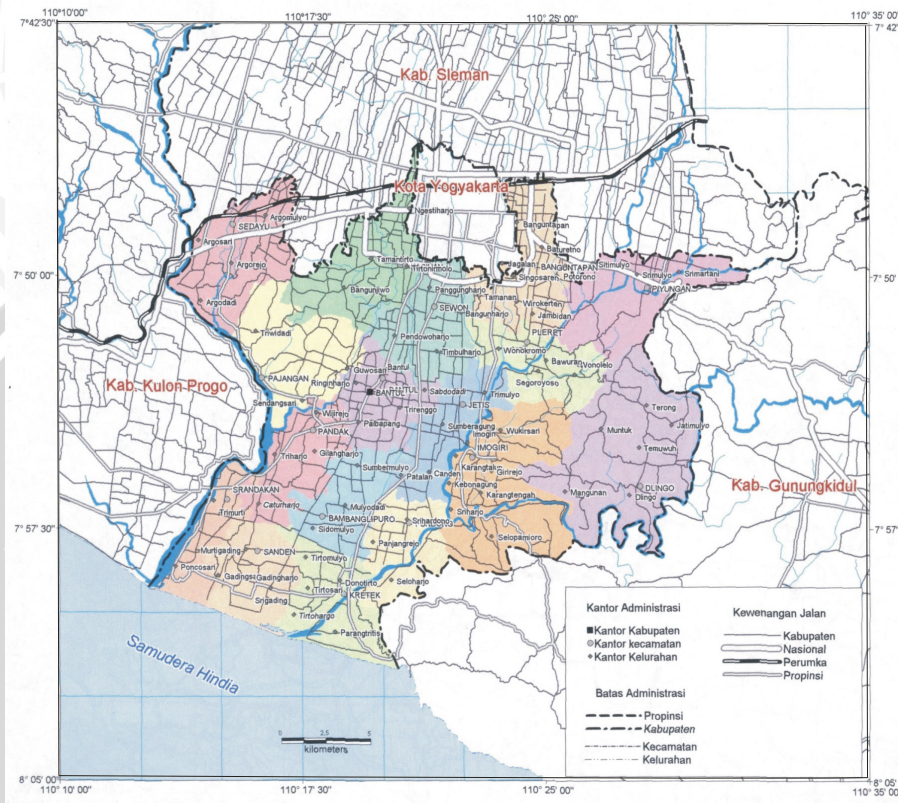
## 2). MISI

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Adapun **MISI** Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.
- Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
- Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.





**Gambar 1:**  
**Peta Daerah Kabupaten Bantul**



## **f. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Daerah (DIPARDA) Kabupaten Bantul**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Dalam pelaksanaan kewenangan Kabupaten di bidang kepariwisataan, maka perlu menata kembali organisasi Dinas Pariwisata yang telah ada untuk disesuaikan dengan beban dan tugas serta perkembangan kepariwisataan saat ini serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Perda Nomor 42 Tahun 2000, sedang mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dijabarkan dalam SK Bupati Bantul Nomor 249 Tahun 2001.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai organisasi teknis memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Kabupaten di bidang kepariwisataan. Fungsi dari keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diantaranya adalah :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kebijakan teknis di bidang kepariwisataan.
2. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kepariwisataan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang kepariwisataan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Melaksanakan pembinaan operasional bidang pariwisata dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan perijinan bidang kepariwisataan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kepariwisataan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengelola rumah tangga dan tata usaha Dinas Pariwisata.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
  - d. Sub Bagian Kepegawaian
- 3). Sub Dinas Obyek dan daya Tarik Wisata terdiri dari :
  - a. Seksi Obyek Wisata
  - a. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
  - b. Seksi Atraksi Wisata
- 4). Sub Dinas Sarana Wisata terdiri dari :
  - a. Seksi Akomodasi dan Fasilitas Wisata
  - b. Seksi Usaha Wisata
  - c. Seksi Perijinan Kepariwisataaan
- 5). Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi Wisata
  - b. Seksi Pelayanan informasi
  - c. Seksi Bimbingan Wisata

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dari masing-masing jabatan:

a). Kepala Dinas :

- 1). Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas pariwisata.
- 2). Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas dibantu oleh seorang wakil kepala dinas yang bertugas :
  - Membantu kepala dinas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
  - Mengkoordinasikan kegiatan internal saluran kerja lingkup dinas dan unit pelaksana teknis dinas.
  - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

b). Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan dan administrasi. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud maka bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Melaksanakan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan.
- Melaksanakan urusan perencanaan.
- Pengelola keuangan.
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, serta melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perpustakaan

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan laporan pertanggungjawaban.

(3) Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data kepariwisataan, penyusunan rencana dan pengembangan kepariwisataan serta penyusunan laporan kegiatan.

(4) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c). Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata

Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, perijinan, dan menyiapkan bahan kerjasama bidang pariwisata serta pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Obyek dan daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan atraksi wisata.
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian teknis, evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- Penyiapan bahan kerjasama di bidang kepariwisataan.

Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

(1) Seksi Obyek Wisata

Seksi obyek wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan obyek wisata, pengembangan dan pemantauan obyek wisata.

(2) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum serta menginventarisasi tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum.

(3) Seksi Atraksi Wisata

Seksi atraksi wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi wisata, menyelenggarakan atraksi wisata,

menyiapkan bahan kerjasama serta melakukan pemantauan kegiatan atraksi wisata.

d). Sub Dinas Sarana Wisata

Sub Dinas Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, perijinan serta pemantauan sarana wisata yang meliputi akomodasi dan fasilitasi wisata serta usaha wisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Dinas Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha wisata dan perkemahan.
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha akomodasi dan fasilitas wisata.
- Penerbitan perijinan bidang kepariwisataan
- Penyelenggaraan pemeliharaan sarana wisata.
- Pengawasan dan pengendalian teknis dan evaluasi di bidang sarana wisata.

Sub Dinas Sarana Wisata terdiri dari :

(1) Seksi Akomodasi dan Fasilitas Wisata

Seksi akomodasi dan fasilitas wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis akomodasi rumah makan restoran, pemberian rekomendasi untuk turis serta melakukan bimbingan teknis pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas wisata.

(2) Seksi Usaha Wisata

Seksi usaha wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha wisata pada obyek wisata dan kawasan wisata.

(3) Seksi Perijinan Kepariwisataan

Seksi ini mempunyai tugas memeriksa permohonan ijin, memberi petunjuk kepada pemohon, bimbingan teknis, peninjauan lokasi, meneliti dan yang lain sesuai uraian memproses penerbitan perijinan di bidang pariwisata.

e). Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Sub dinas pemasaran dan penyuluhan wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian teknis bidang pemasaran dan penyuluhan wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata
- Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan aparat pengelola pariwisata
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, sosialisasi peraturan/ ketentuan-ketentuan di bidang pariwisata.

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

(1) Seksi Promosi Wisata

Seksi promosi wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, seni dan budaya.

(2) Seksi Pelayanan Informasi

Seksi pelayanan informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi wisata.

(3) Seksi Bimbingan Wisata

Seksi bimbingan wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan wisata.

f). Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Uraian tugas masing-masing unit kerja diatur tersendiri dengan keputusan Bupati

**TABEL 1 :**

**Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul  
Menurut Jabatan Bulan Desember Tahun 2006**

JENIS JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
STRUKTURAL	8	7	15
FUNGSIONAL	1	0	1
NON SRUKTURAL	52	14	66
TOTAL	61	21	82
PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL			
ESELON II	0	0	0
ESELON III	2	2	4
ESELON IV	4	6	10
TOTAL	6	8	14

Sumber : *Buku Induk Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat komposisi jumlah pegawai DIPARDA bantul menurut jenis jabatannya. Pegawai yang menduduki jabatan struktural berjumlah 15 orang, terdiri dari 8 pegawai laki-laki dan 7 orang perempuan. Sedangkan untuk jabatan fungsional ditempati hanya 1 orang pegawai laki-laki. Kemudian untuk jabatan non struktural, jumlahnya sebanyak 66 orang, terdiri dari 52 laki-laki, dan 14 orang pegawai perempuan. Untuk jabatan Eselon II posisinya masih kosong, kemudian jabatan Eselon III jumlahnya 4 orang yang diisi oleh 2 pegawai laki-laki dan 2 pegawai perempuan. PNS yang menduduki jabatan Eselon IV berjumlah 10 orang, yaitu 4 orang laki-laki dan 6 orang pegawai perempuan. Dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai DIPARDA Bantul jumlahnya sangat kurang, hal ini disebabkan karena banyak pegawai yang mempunyai potensi bagus telah direkrut atau dipindahkan ke instansi lain di Ibu Kota Kabupaten.



**TABEL 2 :**  
**Komposisi pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Menurut Golongan Tahun**  
**2006**

GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
GOL.RUANG II/a	3	0	3
GOL RUANG II/b	1	0	1
GOL RUANG II/c	6	1	7
GOL RUANG II/d	12	3	15
TOTAL	22	4	26
GOL. RUANG III/a	4	4	8
GOL. RUANG III/b	23	2	25
GOL. RUANG III/c	6	3	9
GOL. RUANG III/d	4	7	11
TOTAL	37	16	53
GOL. RUANG IV/a	1	0	1
GOL. RUANG IV/b	1	1	2
GOL. RUANG IV/c	0	0	0
TOTAL	2	1	3
JUMLAH TOTAL	61	21	82

Sumber :*Buku Induk Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*

Tabel 2 merupakan jumlah pegawai DIPARDA Bantul menurut golongan dan ruang. Untuk golongan IIa sampai dengan IId jumlah pegawainya adalah 26, terdiri dari 22 orang pegawai laki-laki dan 4 orang pegawai perempuan. Dari golongan IIIa sampai dengan golongan IIIId jumlah pegawainya adalah 53 orang, yaitu 37 pegawai laki-laki dan 16 orang pegawai perempuan. Untuk golongan IVa sampai golongan IVc jumlahnya hanya 3 orang, golongan IVa diisi 1 orang pegawai laki-laki, golongan IVb ditempati oleh 1 orang pegawai laki-laki dan 1 orang pegawai perempuan, sedangkan untuk golongan IVc posisinya masih kosong. Sehingga jumlah total keseluruhan pegawai DIPARDA Bantul menurut golongan adalah 82 orang, dengan komposisi 61 pegawai laki-laki dan sisanya 21 orang pegawai perempuan. Dari tabel diatas, banyaknya posisi kosong baik untuk golongan IIa, IIb maupun golongan IV disebabkan karena banyak pegawai yang belum memenuhi persyaratan yang ada, seperti misalnya jenjang pendidikan, maupun jenjang karir yang mendukung untuk menempati posisi tersebut.

**TABEL 3 :**  
**Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Jabatan Struktural dan**  
**Fungsional Bulan April Tahun 2007**

NO	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala		Drs. Riyanto,M.Si	490024640	Pembina TK I. IV/b	TMT 01 April 2007
2	Kepala Bag Tata usaha		Suhartini, SH	490026487	Pembina Tingkat I. IV/b	
3	Ka.Sub.Bag Umum	-	-	-	-	TMT, 01Apr il 2007
4	Ka.Sub. Bag Keuangan	-	-	-	-	TMT, 1 Maret 2007
5	Ka.Sub.Bag Perencanaan	-	Tlau Sakti Santoso, SH, M.Hum	490031975	Penata III/c	
6	Ka.Sub.Bag. Kepegawaian	-	Setyawati S.Psi	490036665	Penata TK I.IV/d	
7		Arsiparis pelaksana Lanjutan	Sugiyanto	490020668	Penata Muda TK I.III/b	
8	Ka.Sub.Dinas ODTW	-	Ir.Ign. Bambang Sugiantoro	080070189	Pembina TK I.IV/b	
9	Ka.Seksi Obyek Wisata	-	Indro Suprianto,Bc.HK	490417390	Penata TK I.III/d	
10	Ka. Seksi RHU	-	Wiwik Tri Budiarto, B.Sc	490024712	Penata III/c	TMT, 01 April 2007
11	Ka.Seksi Atraksi Wisata	-	Ni Nyoman Yudiriyani, SET	490024705	Penata III/c	TMT, 01 April 2007
12	Ka.Sub. Dinas Sarana Wisata	-	Susilo,BAE.SE	490028267	Pembina IV/a	

1	2	3	4	5	6	7
13	Ka.seksi Akomodasi Fasilitas Wisata	-	Hartono, BBA	490017425	Penata TK I. III/d	
14	Ka. Seksi Usaha wisata	-	Elis Fitriyati, SIP	490030491	Penata TK I. III/d	
15	Ka.Seksi Perijinan Kepariwisataan	-	Chaterina Indriyati sulistyorini, SH.CN	490028267	Penata TK I.III/d	
16	Ka.SubDin Pemasaran dan Penyuluhan Wisata	-	A. Diah Setiawati, SH	490027916	Penata TK I. III/d	
17	Ka. Seksi. Promosi Wisata	-	Aluisius Bambang Priharyanto,SS	490030663	Penata TK I. III/d	
18	Ka.Sek. Pelayanan Informasi	-	Dra. Annihayah	490029699	Penata TK I. III/d	
19	Ka.Seksi Bimbingan Wisata	-	Edi Supriyanto	490027935	Penata TK I. III/d	

Sumber : *Buku Induk Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*

Berdasarkan tabel Nomor 3 di atas, jumlah seluruh pegawai DIPARDA Bantul berdasarkan jabatan struktural adalah 18 orang dan 1 orang pada jabatan fungsional. Pada posisi bagian keuangan, jabatan tersebut masih belum terisi.

## 2 Data Fokus Penelitian

### A. Potensi Pariwisata Yang Ada di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, dimana pada tahun 1996 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke-3 dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara. Lokasi potensi wisata Kabupaten Bantul tersebar di Kecamatan Kretek, Imogiri, Sanden,

Srandakan, Pajangan, Kasihan, dan Piyungan. Obyek wisata di Bantul meliputi, antara lain :

1). Obyek wisata alam

Obyek wisata alam di Kabupaten Bantul terdiri atas obyek wisata pantai, pegunungan, goa dan hutan serta agrowisata. Nama dan jenis obyek wisata tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

=>Pantai : Kawasan pantai selatan memiliki panorama yang sangat indah seperti pantai parangtritis dengan legenda Ratu Roro Kidul, pantai pandansimo, dan juga pantai samas yang juga menjadi primadona.

**Tabel 4 : Obyek wisata Pantai di Bantul**

No	Nama obyek wisata	lokasi
1	2	3
1	Pantai Parangtritis	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
2	Pantai Pandansimo	Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
3	Pantai Samas	Desa Srigading, Kecamatan Sanden
4	Pantai Depok	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
5	Pantai Patehan	Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden
6	Pantai Parangkusumo	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek

Sumber : *Peta Potensi Wisata Kabupaten Bantul*

=>Pegunungan : Daerah pegunungan yang ada di Kecamatan Dlingo dan Piyungan dapat juga dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata yang cukup menarik. Seperti pegunungan Hargodumilah dan Tugu Padang Nganjir.

**Tabel 5 :Obyek wisata alam pegunungan di Bantul**

No	Nama obyek wisata	lokasi
1	2	3
1	Pegunungan Hargodumilah	Desa Srimulyo.Kecamatan Piyungan
2	Tugu Pandang Nganjir	Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo

Sumber : *Peta Potensi Wisata Kabupaten Bantul*

=>Goa dan Hutan : Berbagai kecamatan di Kabupaten Bantul juga memiliki obyek wisata goa. Kebanyakan dari obyek tersebut mengandung nilai-nilai sejarah. Seperti goa selarong yang dulunya pernah digunakan sebagai markas gerilya Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan

penjajahan Belanda pada tahun 1825-1830. Beliau pindah ke Gua Selarong setelah rumahnya di Tegalrejo diserang dan dibakar habis oleh Belanda. Nama obyek wisata goa yang ada dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

**Tabel 6 : Obyek wisata Goa dan Hutan di Bantul**

No	Nama obyek wisata	lokasi
1	2	3
1	Goa Gajah	Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
2	Goa Cerme	Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri
3	Goa Jepang	Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong
4	Goa Sunan mas (Surocolo)	Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong
5	Goa Nogobumi	Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong
6	Goa Payaman	Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu
7	Goa Lawa	Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri
8	Hutan Wanagama	Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo

Sumber : *Peta Potensi Wisata Kabupaten Bantul*

=>Agrowisata : Agrowisata merupakan obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah dan DIPARDA yang berasal dari hasil pertanian.

**Tabel 7 : Obyek Agrowisata di Bantul**

No	Nama obyek wisata	lokasi
1	2	3
1	Pabrik Gula Madukismo	Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan
2	Mangkang	Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan
3	Kebun buah-buahan	Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo

Sumber : *Peta Potensi Wisata Kabupaten Bantul*

## 2). Obyek wisata sejarah

Kabupaten bantul kaya akan nilai-nilai sejarah. Di beberapa Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bantul banyak sekali ditemukan petilasan dan makam Raja-raja Mataram. Selain itu juga terdapat beberapa museum yang digunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah, seperti museum Wayang Kekayon yang didirikan dengan tujuan preservasi kebudayaan nasional, khususnya kebudayaan wayang dan hal-hal yang

terkait dengan tujuan tersebut. Sebagai tujuan wisata, museum itu memiliki fungsi pendidikan, wahana penelitian, dan rekreasi

Untuk lebih jelasnya, macam dan jenis obyek wisata sejarah yang ada di Bantul dapat dilihat pada tabel Nomor 8 di bawah ini.

**Tabel 8: obyek wisata sejarah di Bantul**

No	Nama obyek wisata	lokasi
1	2	3
1	Petilasan Gua Selarong	Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan
2	Petilasan Ki Ageng Mangir	Desa Sendangsari, kecamatan Pajangan
3	Petilasan Pandansari	Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
4	Petilasan Pandan Payung	Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
5	Petilasan Ambarbinangun	Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan
6	Petilasan dan ziarah Pandansimo	Desa Poncosari, Kecamatan srandakan
7	Petilasan dan ziarah Parangkusumo	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
8	Sendang Kasihan	Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan
9	Sendang Semanggi	Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan
10	Sumber air Bengkung	Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
11	Sumur Bandung	Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan
12	Makam Raja-raja Mataram	Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri
13	Makam Kotagede	Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan
14	Makam Sunan Cirebon	Desa Wukirsasi, Kecamatan imogiri
15	Makam Sewu	Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak
16	Makam Seniman	Desa Wukirsasi, Kecamatan Imogiri
17	Makam Pahlawan	Desa Patalan, Kecamatan Jetis
18	Makam Syekh Belabelu	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
19	Makam syekh Maulana Maghribi	Desa parangtritis, Kecamatan Kretek

No	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1	2	3
20	Museum Wayang Kekayon	Desa Baturetno, kec. Banguntapan
21	Museum Batik	Desa Girirejo, Kecamatan imogiri
22	Monumen Segoroyoso	Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret
23	Monumen Bibis	Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan
24	Monumen TNI-AU Ngoto	Des Tamanan, Kec Banguntapan
25	Monumen Brimob	Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu
26	Monumen Panglima Besar Jendral Sudirman	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
27	Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo	Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan
28	Situs Kraton Kerto	Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret
29	Situs Watu Wedhok	Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri
30	Situs Batu Songkamal	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan
31	Situs watu Lindung	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan
32	Situs Payak	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan
33	Situs Watugilang	Desa Jagalan, kecamatan Banguntapan
34	Situs candi Ganjuran	Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro
35	Pemandian Parangwedang	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
36	Kid Fun Park	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan
37	Bendung Tegal	Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri
38	Kolam renang Parangtritis	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
39	Kolam renang Tirtotamansari	Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul

Sumber : *Peta Potensi Wisata Kabupaten Bantul*

### 3). Obyek wisata budaya

Obyek wisata budaya sejarah yang ada di kabupaten Bantul meliputi upacara adat, kerajinan desa budaya maupun lembaga-lembaga budaya seperti yang terdapat pada tabel 9 berikut :

**Tabel 9 :**  
**Obyek wisata budaya di Bantul**

No	Nama obyek wisata	lokasi
1	2	3
1	Upacara adat mitoni,tedak siten dan perkawinan	Desa Patalan, Kecamatan Jetis
2	Kursus budaya, bahasa, gamelan, tari di Lembaga Study Jawa	Kecamatan Sewon
3	Upacara Labuhan	Pantai Selatan
4	Pembuatan gerabah kasongan	Kecamatan Kasihan
5	Pembuatan topeng	Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan
6	Sentra batik, kulit, dan keris	Kabupaten Bantul
7	Perguruan Pencak silat	Kabupaten Bantul
8	Pembuatan wayang klithik	Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan
9	Kerajinan Tatah Sungging	Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri

Sumber : *Peta Potensi Wisata Kabupaten Bantul*

Dari tabel Nomor 9 di atas dapat dilihat berbagai jenis obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Obyek wisata alam terdiri atas pantai sebanyak 6 obyek, pegunungan terdiri atas 2 obyek, wisata goa sebanyak 2 obyek ditambah dengan 1 obyek wisata hutan dan 3 wisata agro. Sehingga jumlah keseluruhan dari obyek wisata alam adalah 19 obyek wisata. Kemudian wisata sejarah dan budaya masing-masing berjumlah 39 dan 9 jenis obyek wisata. Sentra-sentra kerajinan di Bantul juga menjadi obyek wisata, seperti sentra kerajinan di Pucung (tatah sungging), di Kreet (wayang klithik, patung dan topeng kayu), di Manding (kulit), atau di Wijirejo (batik tulis) Bahkan untuk subsektor ini wilayah pemasarannya tidak hanya berskala regional namun telah mencapai skala internasional.

Dari sekian banyak potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul



Nomor 03 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul memprioritaskan pengembangan beberapa obyek wisata yang lebih potensial, antara lain :

1. Obyek Wisata Alam

a. Pantai Parangtritis.

Salah satu dari pantai yang menarik di Yogyakarta adalah pantai Parangtritis. Berlokasi sekitar 27 Km dari kota Yogyakarta yang dapat dicapai melalui desa Kretek atau rute yang lebih panjang, tetapi pemandangannya lebih indah yaitu melalui Imogiri dan desa Siluk. Pantai Parangtritis adalah pantai yang landai, dengan bukit berbatu, pesisir dan berpasir putih serta pemandangan bukit kapur disebelah utara pantai. Di kawasan ini wisatawan dapat berkeliling pantai menggunakan bendi dan kuda yang disewakan dan dikemudikan oleh penduduk setempat. Selain terkenal sebagai tempat rekreasi, parangtritis juga merupakan tempat keramat. Banyak pengunjung yang datang untuk bermeditasi. Pantai ini merupakan salah satu tempat untuk melakukan upacara Labuhan dari Kraton Yogyakarta.



**Gambar 3 :pantai Parangtritis**

b. Pantai Patehan

Pantai Patehan secara administratif masuk dalam Desa Srigading, Kecamatan Sanden. Lokasi Pantai Patehan berjarak 1 km sebelah barat Pantai Samas atau 2 km sebelah timur Pantai Pandansimo. Pantai Patehan sama sakali belum mempunyai fasilitas pendukung seperti, warung, parkir

ataupun losmen, fasilitas yang ada di pantai ini adalah menara mercu suar yang dapat dimasuki hingga bagian paling atas, sehingga pemandangan ke ke seluruh pantai dapat terlihat secara keseluruhan.



**Gambar 4 : Pantai Patehan**

c. Pantai Samas

Pantai Samas terletak sekitar 24 km dari kota Yogyakarta ke arah selatan melewati ibukota Bantul. Pantai Samas terkenal dengan ombak laut yang besar, delta-delta sungai dan danau air tawar yang membentuk telaga. Telaga-telaga tersebut digunakan untuk pengembangan perikanan dan udang galah yang dilakukan oleh Sub Dinas Perikanan Propinsi DIY serta berbagai lokasi pemancingan. Seperti halnya kawasan Pantai Parangtritis, di Pantai Samas telah dikembangkan sarana akomodasi dan rumah makan. Pantai ini sangat mudah untuk dicapai dengan berbagai jenis kendaraan darat karena prasarana jalan telah baik.



**Gambar 5 : Wisata Pantai Samas**

#### d. Pantai Pandansimo

Pantai ini berada di desa Poncosari, kecamatan Srandakan kurang lebih 30 km dari Yogyakarta ke arah selatan. Terletak bersebelahan dengan Muara Sungai Progo, merupakan pantai paling barat dari deretan pantai Selatan yang masuk wilayah Kabupaten Bantul. Deburan ombak yang besar dan liar dengan kelengkungan ombak yang tajam, suasana mistis yang masih kental dengan banyaknya petilasan yang keramat, hiruk-pikuk nelayan melawan melawan ganasnya ombak merupakan gaya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain panorama pantai yang sangat indah, di Pantai Pandansimo juga terdapat objek wisata Ziarah dan tradisi. Salah satu hal yang dapat menarik minat wisatawan adalah disini wisatawan dapat berbelanja ikan laut langsung dari nelayan lokal. Nama Pandansimo sendiri berasal dari kata “Pandan” (pohon pandan.) dan “Simo” (macan). Di sini juga terdapat berbagai atraksi diantaranya upacara tradisi Merti Dusun, upacara labuhan sedekah laut nelayan Pandansimo dan pentas seni budaya.



**Gambar 6 : Pantai Pandansimo**

#### e. Gumuk Pasir

Gumuk pasir di sebelah barat Pantai Parangkusumo merupakan laboratorium alam. Keberadaan laboratorium alam sangat diperlukan guna memahami kondisi dan gejala alam yang masih belum diketahui manusia. Kondisi alam sangat banyak ragamnya dan belum banyak dimengerti. Salah satunya adalah fenomena adanya gumuk pasir di daerah tropis. Gumuk Pasir di daerah tropis sangat banyak macamnya dan yang paling unik adalah ditemukannya jenis barchan yang di Indonesia hanya terdapat di kawasan

wisata Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan gumuk pasir dengan tipe barchan di Parangtritis sangat unik dan menarik untuk diteliti, dipahami, dan dilestarikan. Gumuk Pasir ini merupakan fenomena yang menarik dipandang sebagai obyek wisata.



**Gambar 7: Gumuk Pasir**

f. Taman Rekreasi Tirtotamansari

Merupakan tempat rekreasi dengan fasilitas wisata air seperti kolam renang untuk anak-anak, dan dewasa . Serta tempat-tempat rekreasi permainan yang ada di air, misalnya becak dan sepeda air. Tirtotamansari juga dilengkapi dengan pusat-pusat pemancingan dan prasarana rumah makan.



**Gambar 8 : Taman Rekreasi Tirtotamansari**

2. Obyek Wisata Budaya/Sejarah.

a. Gua Selarong

Gua Selarong terletak di Kelurahan Guosari, Pajangan, Bantul. Gua Selarong merupakan monumen sejarah tempat / markas Pangeran

Diponegoro. Tetapi disini banyak pula di temukan benda cagar budaya berupa yoni berjumlah 4 (empat buah). Semua yoni diletakan terbalik dan di gunakan sebagai tempat duduk.



**Gambar 9 :Gua Selarong**

b. Sendang Kasihan, Petilasan Sunan Kalijaga

Sendang Kasihan secara administratif terletak di Dusun Kasihan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY. Tepatnya berada sekitar 1,5 km di sebelah barat pabrik gula Madukismo. Lokasi ini dapat dijangkau dari perempatan Kasihan (ring road selatan) lurus ke selatan kurang lebih 1 kilometeran. Sendang Kasihan ini memiliki keistimewaan karena airnya tidak pernah kering. Mata air yang muncul dari dalam tanah pun bening. Sendang ini bila diamati dari timur akan tampak gambaran keseluruhannya seperti pohon beringin. Akan tetapi jika diamati dari arah barat maka akan tampak gambaran seperti sebetuk kendi



**Gambar 10 : Sendang Kasihan**

c. Goa Gajah

Gua gajah terletak di Dusun Sukorame, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo. Gua Gajah merupakan gua karst yang terletak pada kawasan karst gunung sewu. Gua ini merupakan gua horisontal dengan panjang kurang lebih 50 meter. Nama Gua Gajah berasal dari ciri khas gumpalan batu yang berbentuk menyerupai gajah. Bentuk gua gajah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 11 : Goa Gajah**

d. Goa Jepang

Goa ini berada di dusun Ngreco, dan Poyahan, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Gua Jepang merupakan peninggalan Perang Dunia II. Sebagai sarana pertahanan militer ( masa ) Jepang pada tahun 1942-1945, terutama setelah Jepang mempertahankan diri dari kedatangan sekutu di Indonesia. Gua Jepang ini di bangun untuk memenuhi keperluan perang gerilya karena Jepang memperkirakan bahwa tentara sekutu akan datang melewati laut selatan dan mendarat di sekitar pantai Parang Tritis. Di gua ini di temukan 18 bangunan bunker yang sebagian besar masih dalam keadaan utuh. Bentuk bunker tersebut beraneka ragam, serta mempunyai fungsi yang berlainan pula, misalnya sebagai tempat pengintaian, ruang tembak, ruang pertemuan, gudang dan dapur. Ketebalan dinding rata-rata 50-70 cm , dari bahan beton bertulang, semen dan batu padas yang sudah tersedia disekitarnya. Bunker-bunker tersebut di bangun saling berdekatan (30 m), serta di hubungkan dengan parit perlindungan yang berada di luar setinggi (1 m).



**Gambar 12 : Goa Jepang**

e. Makam Bela Belu

Disini terdapat dua makam yaitu, Syeh Bela Belu dan Damiakik. Menurut sejarah, Syeh Bela Belu merupakan anggota kerajaan Majapahit yang giat menyebarkan agama Islam. Sebagai ulama beliau sering berpindah pindah sebelum menetap di tempat ini, sampai meninggal dunia. Usia makam ini sama dengan usia makam Syeh Maghribi . Di tempat ini juga di temukan arca Banteng dan arca Putri, yang tidak utuh lagi, dan di perkirakan berhubungan dengan makam. Makam ini terletak di atas Bukit Banteng, dicapai dengan tangga selebar 1,60 m. di pagar tembok setinggi 1,50m.



**Gambar 13 : Makam Bela Belu**

f. Komplek Makam Raja-raja Imogiri

Kornpleks ini berada di Kelurahan. Ginirejo Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Komplek makam Imogiri merupakan komplek makam yang diperuntukkan bagi raja raja Mataram dan keluarganya. Makam ini didirikan oleh Sultan Agung antara tahun 1632 – 1640 M. merupakan bangunan milik kraton. Kontruksi bangunan aslinya terbuat dari batu bata.



**Gambar 14 : Kompleks makam Raja-raja Imogiri**

g. Goa Cerme

Goa Cerme pada awalnya adalah tempat pertemuan yang digunakan oleh Walisongo untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Jawa. Kata 'Cerme' berasal dari kata 'ceramah', pembicaraan yang diadakan selama pertemuan dalam membahas rencana mendirikan Masjid Besar di Demak, sebuah kota di utara Jawa Tengah. Terletak di desa Selopamiro Kecamatan Imogiri 20 km arah selatan dari Yogyakarta. Panjang goa seluruhnya kurang lebih 1,5 km dan berakhir pada sebuah sendang di wilayah Panggang, tepatnya di desa Ploso, Giritirto, Kabupaten Gunungkidul. Rata rata kedalaman aliran air sekitar 1 -1,5 m. Selain goa utama ada goa lain yang lebih kecil dimana dahulu digunakan untuk tempat meditasi seperti goa Dalang, Goa Ledhek, goa Badhut, dan goa Kaum. Daya tarik utama dari Goa cerme ini adalah keindahan stalagtit dan stalagmit serta adanya sungai bawah tanah dan kelelawar yang banyak bergelantungan di dalam gua.



**Gambar 15: Obyek Wisata Goa Cerme**



### 3. Desa Wisata

#### a. Desa wisata Kasongan

Kerajinan gerabah di Bangunjiwo Kasihan atau lebih dikenal dengan nama Kasongan, telah ada sejak dulu, tetapi sejak 1974 para pembuat gerabah banyak mendapat bimbingan dan binaan baik untuk permodalan maupun desain gerabah. Produk yang dihasilkan beraneka ragam baik barang fungsional maupun barang dekorasi. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kerajinan ini adalah tanah liat dan sedikit pasir. Proses pembuatannya dimulai dari pemurnian tanah liat dari kotorannya, kemudian tanah liat dijemur 2 -3 hari, lalu direndam sehari semalam dan didiamkan sehari semalam. Kemudian tanah liat tersebut dicampur dengan sedikit pasir yang telah diayak dan dicuci, setelah proses ini tanah liat sudah bersifat plastis dan siap dibentuk. Desa yang dapat dijadikan obyek wisata di Kecamatan Kasihan adalah Kasongan. Desa wisata Kasongan ini terletak di desa Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, berjarak sekitar 6 km dari kota Yogyakarta. Dusun Kasongan sudah terkenal sejak lama. Terdapat banyak produk kualitas ekspor yang tersedia, seperti peralatan rumah tangga seperti piring, mangkuk dan guci. Pengunjung tidak hanya berbelanja tetapi juga dapat menikmati secara langsung proses pembuatan keramik.

#### b. Desa wisata Kreet

Kerajinan kayu yang mulai dari tahun 1972 hanya dilakoni oleh 2 atau 3 kepala keluarga, berkembang pesat sejak tahun 1990an. Produk yang dihasilkan berkembang dari semula hanya topeng kayu berkembang menjadi wayang klithik, topeng kayu, peralatan rumah tangga, patung - patung hewan, loro - blonyo, pigura bahkan meubel. Motif hasil produksipun berkembang dalam bentuk batik pada kayu. Saat ini di Desa Kreet berkembang kurang lebih 20 sanggar pengrajin yang dapat menyerap kurang lebih 350 tenaga kerja lokal. Hasil produk di pasarkan dengan cara membuka showroom di sanggar, juga dijual ke Yogya, Jakarta dan Bali.

#### c. Desa Wisata Manding

Desa wisata manding terletak di Jalan Parangtritis, di tempat ini banyak pengrajin kulit dan aneka kerajinan lainnya, selain pengrajin di

Manding juga banyak toko yang menjajakan produk – produk kerajinan kulit seperti, jaket, sepatu tas dan ikat pinggang serta asesoris yang terbuat dari kulit, seperti pigura dan gantungan kunci. Manding sebagai salah satu sentra usaha kerajinan kulit di Kabupaten Bantul , terdapat sekitar 40 usaha kulit tradisional, melibatkan 1.000-1.500 pekerja.



**Gambar 16: Kerajinan Manding (Kulit)**

#### 4. Sentra Kerajinan

##### a. Sentra Kerajinan Tatah Sungging

Sentra industri tatah sungging kulit terletak di Desa Gendeng, Bangunharjo. ada sekitar 50 orang pengrajin wayang di kampung itu. Berbagai macam jenis dan ukuran wayang diproduksi di kampung ini. Misalnya wayang mini dengan ukuran 10 – 15 cm, wayang besar ukuran lebih dari 60 cm, wayang standar 20 – 60 cm, dan wayang kidangan atau wayang hiasan. Wayang hiasan adalah jenis wayang yang dilukis dan ditatah diatas kulit persegi, yang kemudian dibingkai kayu. Yang ditampilkan dalam lukisan wayang kidangan tidak hanya satu tokoh melainkan beberapa tokoh yang menunjukkan sebuah adegan tertentu dalam kisah pewayangan

##### b. Kerajinan Batik, Giriloyo, Wukirsari

Para pengrajin batik di Giriloyo, Wukirsari, Imogiri berasal dari para abdi dalem Mataram yang berpindah ke Imogiri karena Sultan Agung sedang membangun makam Imogiri. Para abdi dalem ini membawa keahlian membatik dari Kotagede ke Giriloyo serta mewariskan keahliannya secara turun temurun. Produk yang dihasilkan berupa taplak meja, udheng, kain

jarit dan sebagainya. Bahan baku membuat berupa kain dan malam didapat dari toko - toko di Yogyakarta.



**Gambar 17 : Kerajinan batik Giriloyo**

Sampai saat ini, obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Bantul yang sudah cukup berkembang adalah:

1. ODTW Parangtritis (wisata alam & ritual/budaya)
2. ODTW Pantai Samas (wisata alam & ritual/budaya)
3. ODTW Pantai Pandansimo (wisata alam & ritual/budaya)
4. ODTW Goa Cerme (wisata alam, budaya/ritual, & petualangan)
5. ODTW Goa Selarong (wisata alam, sejarah, & pendidikan)
6. Kolam Renang Tirtatamansari (tempat rekreasi & berenang)
7. Makam Raja-Raja di Imogiri (wisata budaya/ritual)
8. Desa Wisata Kreet (wisata minat khusus)
9. Desa Wisata Kasongan (wisata minat khusus)



Gambar 18 : Peta Wisata Kabupaten Bantul



## **B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Pariwisata Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah**

Dalam bidang pariwisata, secara umum pembangunan diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas. Dengan konteks semacam ini, pengembangan pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama, serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam pengembangan pariwisata DIPARDA membutuhkan sarana dan fasilitas untuk membantu kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Kehidupan semakin berkembang dan semakin kompleks, sehingga tuntutan wisatawan semakin banyak. Kondisi seperti ini harus mampu dijawab oleh DIPARDA sebagai pengelola obyek dan daya tarik wisata dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap untuk memberi kepuasan kepada pelanggan atau wisatawan. Selama bepergian tentunya wisatawan membutuhkan berbagai sarana dan prasarana wisata.

Oleh karena itu, sebagai upaya memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan yang datang, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan beberapa langkah pengembangan yang diantaranya :

### **a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata**

Pengembangan kawasan wisata harus didukung pula dengan pengembangan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengembangan wisata. Usaha pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya DIPARDA Kabupaten Bantul adalah:

#### **1) Sarana Pokok Pariwisata**

Sarana pokok pariwisata di Kabupaten Bantul cukup memadai, khususnya disekitar obyek wisata. Sarana pokok tersebut adalah sarana perhubungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah jalan, kemudian angkutan wisata, hotel, losmen, rumah makan, restoran dan atraksi wisata.

Dalam upaya pengembangan, setiap usaha di bidang pariwisata harus memiliki ijin usaha sesuai dengan PERDA No 10 Tahun 2003 dan PERDA No 11 tahun 2003 yang meliputi Hotel dan Penginapan rekreasi dan Hiburan Umum. Selain itu juga berlaku SK Bupati No 46 Tahun 2003 tentang Surat Ijin Usaha Kepariwisata yang meliputi :Restoran, Rumah Makan, Usaha Jasa Pariwisata,Obyek dan daya tarik Wisata. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bangunan-bangunan usaha liar disekitar obyek wisata. Selain itu Dinas Pariwisata Daerah juga melakukan pengarahan kepada para pengelola usaha pariwisata agar terus meningkatkan pelayanannya kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara dan memperhatikan kebersihan lingkungan baik di dalam ataupun di luar lingkungan usaha mereka. Rumah makan disekitar obyek wisata sangat banyak dan menyediakan berbagai menu yang berbeda bagi para pengunjungnya, seperti rumah makan soto kadipiro, RM Nyoya Suharti yang terkenal dengan masakan Indonesia (ayam). Sampai dengan tahun 2003 tercatat perkembangan jumlah rumah makan di Kabupaten Bantul sebagaimana berikut:

**Tabel 10 :**  
**Perkembangan jumlah rumah makan di Kabupaten Bantul**

Kelas RM	Jumlah
A	4
B	4
C	150

Sumber: *Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bantul (2003)*.

Sejauh ini jumlah rumah makan tersebut dipandang sudah cukup banyak untuk melayani semua wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya investasi-investasi baru di bidang pelayanan penyediaan makanan. Strategi pemasaran yang bagus dan tepat serta peningkatan kualitas pelayanan akan mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Upaya-upaya pengembangan tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin dan berkelanjutan agar memberikan kepuasan tersendiri bagi para wisatawan, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah wisatawan di masa akan datang. Karena dengan banyaknya wisatawan yang datang, akan meningkatkan pertumbuhan bisnis disekitar obyek wisata. Seperti penyediaan fasilitas akomodasi dan rumah makan, meningkatkan permintaan akan hasil

pertanian untuk memenuhi kebutuhan bisnis rumah makan, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja untuk melayani wisatawan, meningkatkan hasil kerajinan untuk cinderamata, dan seterusnya.

## 2 ) Sarana Pelengkap Pariwisata

Dalam hal ini yang masuk dalam sarana pelengkap wisata adalah sarana olahraga dan tempat ibadah. Untuk tempat ibadah, hampir di setiap jalan menuju obyek wisata maupun di dalam obyek wisata itu sendiri selalu ada. Tetapi dalam pemeliharannya kurang terjaga. Khususnya kamar mandi mushalla ataupun toilet umum bagi para pengunjung. Hal ini mendorong DIPARDA untuk selalu mengontrol dan mengingatkan para pengelola maupun masyarakat sekitar untuk bersama-sama memperhatikan dan menjaga kebersihan fasilitas ibadah yang ada. Sedangkan untuk sarana dan fasilitas olahraga tidak semua obyek wisata memilikinya. Sarana olah raga yang ada disekitar obyek wisata bantul seperti padang golf, terdapat juga gelanggang bowling dan rumah billiard.

## 3 ) Sarana Penunjang Pariwisata

Sarana penunjang yang termasuk dalam hal ini adalah toko souvenir, night club, pasar seni dan boskop. Sebagai salah satu dari sarana pendukung pariwisata, Toko Souvenir sangat diperlukan keberadaannya bagi wisatawan. Karena dalam mengunjungi suatu obyek wisata para wisatawan biasanya membeli barang kerajinan dan souvenir yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Barang kerajinan dan cinderamata tersebut sebagian sudah dijajakan oleh para pedagang asongan ataupun dijual pada warung sekitar obyek wisata. Selain itu, para wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang menginginkan souvenir dengan mutu dan kualitas baik, serta harga yang lebih tetap, dapat memperolehnya di beberapa toko kerajinan/souvenir yang selalu menjaga pelayanannya dengan baik. Selain itu night club dan bioskop yang ada jumlahnya juga tidak terlalu banyak di sekitar obyek wisata. Namun fasilitas yang ada cukup memadai. Hal ini mendorong DIPARDA untuk mengembangkan keberadaan bioskop, dan klub malam.

## 4 ) Prasarana Perekonomian

### 1. Prasarana Angkutan/Transportasi

Sebagian besar jalan beraspal di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik dan akan berpengaruh baik pula dalam mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Jumlah angkutan umum yang melayani wisatawan dari kota ke obyek wisata Bantul juga sudah memadai. Hingga tahun 2003, usaha perjalanan wisata di Kabupaten Bantul berjumlah 11 usaha. Mayoritas berada di Kecamatan Banguntapan. Jumlah yang sedikit ini karena aktivitas kepariwisataan di kabupaten Bantul pada dasarnya merupakan sub-sistem dari kepariwisataan Propinsi DIY. Wisatawan DIY yang menginap kebanyakan memilih penginapan di kota termasuk memilih agen perjalanan wisatanya karena didukung ketersediaan berbagai fasilitas. Dalam hal ini dibutuhkan usaha yang kreatif dari DIPARDA di Kabupaten Bantul untuk dapat bersaing dengan kota dalam pelayanan transportasi bagi wisatawan.

## 2. Prasarana Komunikasi

Agar terjadi hubungan yang baik dengan berbagai pihak, maka diperlukan fasilitas komunikasi yang memadai. Hal ini benar-benar diperhatikan oleh DIPARDA Bantul, dimana usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan penambahan jaringan telepon umum terutama yang ada di Ibu Kota Kecamatan, baik itu telepon umum biasa, telepon kartu dan fasilitas faximili. Disamping itu juga Pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan Telkom serta perusahaan telekomunikasi untuk menambah jaringan telepon bergerak atau yang biasa disebut dengan Hand Phone. Selain itu, Pemerintah Daerah berusaha menambah jumlah warung-warung telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan maupun masyarakat sekitar obyek wisata.

## 3. Prasarana Utilitas.

Yang termasuk dalam prasarana utilitas adalah penerangan listrik, persediaan air bersih. Dalam hal ini, di seluruh obyek wisata Kabupaten Bantul para pengelola dan pemerintah daerah sendiri selalu menyediakan prasarana listrik maupun air bersih. Dalam hal ini pemerintah daerah bekerjasama dengan PLN. Sehingga hampir seluruh kawasan wisata menggunakan prasarana penerangan, begitu juga untuk daerah pemukiman penduduk di setiap kecamatan.



#### 4. Prasarana Perbankan

Dalam pengembangan prasarana perbankan, pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat dikatakan cukup untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakatnya, khususnya dalam pelayanan penukaran mata uang asing terhadap wisatawan mancanegara di bank-bank yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini tentunya sangat membantu upaya kelancaran pariwisata itu sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sudah membangun dan menempatkan bank-bank pemerintah seperti bank BRI, BNI yang ada di seluruh kecamatan. Selain itu juga, bank-bank swasta yang ada berkembang cukup pesat, seperti BCA, BPD dan Bank Mandiri.

#### 5. Prasarana Sosial

Prasarana sosial bertujuan untuk menunjang kemajuan ataupun menjamin kelangsungan dari prasarana perekonomian yang ada. Yang termasuk dalam prasarana sosial adalah :

##### 1). Pelayanan Kesehatan

Jaminan pelayanan kesehatan untuk menunjang kegiatan kepariwisataan yang paling utama bagi masyarakat maupun para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tertentu. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul dirasa cukup memadai. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan telah menyediakan puskesmas di setiap Kecamatan dan beberapa Rumah Sakit di daerah Kabupaten Bantul. Rumah Sakit merupakan sarana penting yang paling dibutuhkan oleh wisatawan yang berkunjung.

**Tabel 11 : Rumah Sakit di Kabupaten Bantul**

Nama	Alamat
RSU Bantul	Jebugan
RS Patma Suri	Krapyak, Panggunharjo
RS St. Elizabeth	Ganjuran

Sumber : *Peta Potensi wisata Kabupaten Bantul*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bantul terdapat 3 Rumah Sakit besar sebagai fasilitas kepariwisataan. Sehingga para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut tidak perlu merasa khawatir bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

## 2). Faktor Keamanan

Dapat digaris bawahi bahwa untuk memulihkan kondisi kepariwisataan di Yogyakarta, khususnya pada Kabupaten Bantul yang terkena dampak bencana gempa secara langsung, pada dasarnya membutuhkan eksistensi semua elemen terkait baik sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun yang paling penting adalah unsur keamanan wisatawan. Dalam situasi pasca gempa ini, elemen itulah yang terpenting bagi wisatawan maupun para karyawan industri pariwisata itu sendiri. Keamanan itu sendiri akan berhubungan dengan citra yang akan diciptakan produk wisata tersebut. Pemulihan citra yang diikuti dengan pemulihan kondisi produk wisata pada situasi pasca gempa saat ini adalah segalanya.

Sebagai upaya untuk memulihkan ketertiban dan keamanan pasca gempa bagi masyarakat maupun bagi wisatawan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyediakan aparat keamanan di setiap kecamatan maupun di sekitar obyek wisata. Khusus di sekitar obyek wisata, DIPARDA bekerjasama dengan para pengelola obyek wisata untuk mendirikan pos keamanan demi menjaga kenyamanan para pengunjung yang sedang menikmati obyek wisata. Aparat keamanan yang disediakan dapat berasal dari satuan kepolisian maupun polisi pamong praja. Polisi pamong praja biasanya ditugaskan pada malam hari untuk mengawasi lokasi sekitar obyek wisata. Pengelolaan SAR di bawah kendali Kesbanglinmas. Selain itu juga pemerintah daerah setempat telah memberikan beberapa rambu-rambu peringatan bagi para wisatawan, seperti peringatan “dilarang Mandi di laut”

## 3). Pelayanan Terhadap Wisatawan

Untuk menunjang kegiatan wisata bagi para wisatawan yang berkunjung, maka dalam hal ini DIPARDA menganjurkan kepada pengelola setiap obyek wisata untuk menyediakan jasa pramuwisata. Pramuwisata merupakan salah satu komponen pokok dalam memandu wisatawan, terutama bagi wisatawan asing. Para pramuwisata itu nantinya berfungsi sebagai pembimbing sekaligus pemberi informasi tentang asal usul maupun sejarah dari obyek wisata yang dikunjungi kepada para wisatawan, tentunya apabila jasa pramuwisata itu dibutuhkan oleh wisatawan tersebut.

**b. Peningkatan Pengelolaan Obyek dan Daya tarik Wisata**

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Tlau Sakti Santoso, SS.M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan DIPARDA Bantul, bahwa :

“Pada dasarnya, yang berwenang mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada adalah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul sendiri, dengan catatan bahwa tanahnya adalah milik pemerintah daerah, contohnya : Pantai Parangtritis, Pandansimo, Samas, Goa cerme dan Goa selarong. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melainkan dipercayakan juga kepada instansi lain baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah daerah atas instruksi dari Kepala Daerah”.

( Sumber : Wawancara dengan Bapak Tlau Sakti Santoso, SS.M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan DIPARDA Bantul, Selasa 27 Maret 2007 Pukul 09.30 WIB).

Pengelolaan obyek wisata yang dilakukan oleh swasta dapat dilakukan sepanjang aset-aset wisata tersebut adalah milik swasta. Selain itu juga pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan swasta dalam pengembangan kawasan wisata yang asetnya masih milik Pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor anggaran pengelolaan yang sangat terbatas jumlahnya. dan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memakan waktu lama. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan minimnya investor membuat pegawai dinas banyak menangani sendiri pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang ada. Hal ini sangat disayangkan sekali, mengingat begitu banyaknya potensi obyek wisata yang ada sehingga menjadikan peluang yang terbuka lebar untuk kegiatan investasi baik dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta.

**c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta**

Dalam upaya pengembangan wisata, Dinas Pariwisata Daerah sangat menyadari pentingnya peranan dari masyarakat setempat ataupun dari pihak swasta. Sejalan dengan itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengajak pula berbagai *stakeholder* yang ada baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk bersama-sama membangun ketahanan pariwisata dan ekonomi kerakyatan melalui program-program yang tepat, baik, efisien dan efektif.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa realitas yang ada menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas pegawai Dinas Pariwisata Bantul sangat minim, sehingga kurang fokus dalam upaya pengembangan wisata. Meskipun begitu, minimnya investasi ternyata mampu memberikan celah kepada masyarakat sekitar obyek wisata untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan obyek wisata secara mandiri. Peningkatan peran serta masyarakat akan sangat membantu secara tidak langsung keterbatasan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata memberikan penghematan tenaga dan dana sehingga DIPARDA sedikit demi sedikit akan dapat memerankan fungsi desentralisasi pariwisata terutama perencanaan pengembangan pariwisata secara maksimal.

Partisipasi masyarakat Bantul dalam pengelolaan obyek wisata juga masih sangat terbatas dalam menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar obyek wisata terkait yang mendapatkan langsung dampak dari perkembangan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, dalam arti bekerjanya birokrasi secara demokratis, juga tidak dapat dipisahkan dari usaha yang lebih luas yaitu usaha membangun sistem ekonomi kerakyatan, yang membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk maju dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berusaha secara aktif dalam kepariwisataan

Atas inisiatif pemerintah daerah, khususnya DIPARDA dalam hal ini bekerjasama dengan pihak swasta melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat Kabupaten Bantul melalui program-program pariwisata, seperti :

- 1) Masyarakat diajak berpartisipasi lebih jauh dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). POKDARWIS diarahkan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan obyek wisata dan menjadi motor penggerak pengembangan wisata di masyarakat. Salah satu wujud dari kegiatan ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bersama Akademi Bahasa Asing IPK Yogyakarta mengadakan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dipusatkan di SD Negeri Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan.

- 2) Melakukan bimbingan dan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung kepariwisataan dengan harapan mengurangi angka pengangguran.
- 3) Melakukan pemberdayaan dan koordinasi dengan pengelola obyek wisata. Misalnya pemilik hotel, rumah makan, dan angkutan jalan agar dapat merekrut pemandu wisata dari masyarakat sekitar yang paham dan mengerti sejarah ataupun asal-usul dari obyek wisata tersebut.
- 4) Melakukan pendekatan serta pengarahan terhadap para Tokoh Masyarakat setempat seperti Alim Ulama, Cendekiawan, Budayawan dan Karang Taruna agar mereka dapat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.
- 5) Merangsang dan mengajak masyarakat di setiap kecamatan untuk bersama-sama menciptakan desa wisata di wilayahnya masing-masing dengan menghasilkan produk kerajinan yang khas dari daerah tersebut.
- 6) Memasyarakatkan dan menjadikan SAPTA PESONA sebagai pijakan utama dalam pengembangan pariwisata.
- 7) Mendirikan sekolah-sekolah jurusan kepariwisataan. Pendidikan wisata di Bantul lebih mengandalakan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atau sekolah kejuruan lainnya.

**d. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Wisata**

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu staf DIPARDA yang bahwa :

“Kegiatan promosi dan pemasaran wisata merupakan suatu kegiatan yang sifatnya sangat vital. Dimana dari kegiatan ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk wisata dapat dipasarkan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat luar lebih tahu dan tertarik akan potensi wisata yang ada di Jogja khususnya di Bantul. Apalagi setelah bencana gempa yang melanda sebagian besar kawasan wisata di Bantul, DIPARDA dan pemerintah daerah setempat harus berupaya keras agar wisatawan, baik dalam ataupun luar berani lagi untuk datang ke obyek wisata Bantul, khususnya kawasan pantai.”

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Alusius Bambang Priharyanto,SS selaku Ka.Seksi Promosi Wisata DIPARDA Bantul. Kamis 24 Maret 2007 Pukul 10.45 WIB)

Dalam memperkenalkan produk obyek dan daya tarik wisata selalu mengutamakan informasi yang efektif, efisien, informatif, menarik, sesuai sasaran, dan mendukung pariwisata Kabupaten Bantul, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- 1) Secara langsung aktif dalam organisasi Java Promo, yaitu suatu kegiatan promosi wisata yang bekerjasama dengan 14 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Membuat brosur atau selebaran dan majalah tentang obyek-obyek wisata potensial di Kabupaten Bantul yang layak untuk dipromosikan.
- 3) Bekerjasama dengan media massa , baik media massa elektronik maupun media cetak untuk mendukung upaya penyampaian informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat luar negeri agar berminat berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul.
- 4) Peningkatan mutu, inovasi produk dan desain hasil kerajinan serta penyebarluasan produk hasil kerajinan baik melalui event pameran, media massa, kunjungan wisatawan dan sebagai perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat kerajinan merupakan salah satu penyeimbang pendapat asli daerah yang signifikan sekaligus merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat.
- 5) Pembuatan Fasilitas Papan Petunjuk Pariwisata. Hal ini dimaksudkan agar wisatawan yang datang dapat dengan mudah mengetahui arah menuju ke suatu obyek wisata.
- 6) Pemerintah Daerah Bantul juga membentuk Lembaga-Lembaga Budaya. Lembaga budaya perlu dikembangkan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan produk wisata maupun sebagai lembaga yang ikut mempromosikan pariwisata Bantul. Lembaga-lembaga budaya yang terdapat di Bantul antara lain : Teater Alam, Rumah Dongeng, Orkes Keroncong Sinten Remen, Rumah Budaya TEMBI, dan teater Garasi.
- 7) Promosi kesenian tradisional dan upacara adat dapat dilakukan dengan melibatkan wisatawan dalam prosesi upacara adat maupun kesenian – kesenian tradisional agar apresiasi wisatawan terhadap upacara adat dan kesenian tradisional meningkat sehingga warga masyarakat lokal yang

menjalankan aktifitas upacara adat dan kesenian tradisional mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga upacara adat dan kesenian tradisional dapat terus dilestarikan.

- 8) Untuk memberikan hiburan dan memulihkan kondisi psikologis pasca gempa bumi 27 Mei 2006, One Production yang berpusat di Sleman mengadakan kegiatan berupa hiburan dan perdagangan kebutuhan dengan label “Gabusan Fair” di Kabupaten Bantul.

Selain itu, saat ini Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sedang merancang dan menyiapkan pembangunan pusat dan pasar seni kerajinan atau yang disebut dengan *Bantul Craft Centre* (yang bersifat non-profit) di Gabusan. Pusat kerajinan ini akan memiliki berbagai fasilitas, seperti pusat informasi pelayanan pemasaran, fasilitas kontainer dan pelayanan ekspor *one stop service*, serta fasilitas wisata. Ini merupakan pusat kerajinan yang bersifat eksklusif, dengan sejumlah bangunan yang dibagi ke dalam blok-blok anjungan menurut jenis komoditi kerajinan. Para pembeli dari luar negeri akan diundang untuk menyaksikan pameran khusus setiap dua tahun sekali.

**e. Pengembangan Kemampuan Pegawai Sebagai Pelaksana**

Dalam perencanaan pembangunan sektor kepariwisataan, selain peran dari masyarakat dan swasta, peran yang tak kalah pentingnya adalah dari pegawai pemerintah atau DIPARDA itu sendiri. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Wati selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

“Dalam upaya pengembangan kawasan wisata, perlu dibarengi juga dengan pengembangan aparturnya sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut. Karena keberhasilan suatu program atau perencanaan pengembangan wisata juga tergantung pada kualitas dan kuantitas pegawai sebagai koordinator maupun sebagai pengawas dilapangan. Sehingga dalam hal ini, DIPARDA membutuhkan dukungan, khususnya dari pemerintah daerah setempat untuk membantu upaya pengembangan kemampuan pegawai yang ada”.

(Sumber : wawancara dengan Ibu Setyawati Selaku Kepala.Sub Bagian Kepegawaian di Kantor DIPARDA Bantul, Selasa 22 Maret 2007, Pukul 10.30 WIB )

Pada dasarnya, rekrutmen pegawai dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian jatah pegawai untuk Dinas Pariwisata sendiri sebanyak 82

orang. Pegawai tersebut, sebanyak 63 orang ditugaskan di kantor dan sisanya ditempatkan di obyek. Sebenarnya, pegawai yang ada jumlahnya sangat kurang, apalagi dalam hal ini kebanyakan dari pegawai tersebut memiliki kemampuan yang minim. Sehingga, banyak sekali jabatan kosong yang belum dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas dan kuantitas untuk posisi tersebut. Misalnya Tata Usaha, Bagian Keuangan dan dan Bagian ODTW. Upaya untuk melakukan pengembangan kemampuan pegawai yang dilakukan oleh DIPARDA antara lain :

- 1). Dengan mengadakan DIKLAT Pengembangan Pariwisata. Diklat tersebut diadakan satu atau dua kali dalam setahun. Biasanya dalam diklat tersebut, DIPARDA mengikutsertakan pegawai yang mempunyai potensi pemahaman perkembangan teknologi yang lebih baik, agar dapat dengan mudah memahami dan menerapkan kemampuan mereka setelah mengikuti diklat tersebut.
- 2). Untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong tersebut, DIPARDA mengusulkan kepada pemerintah daerah agar menempatkan pegawai sebanyak 1 atau 3 orang, dan diurutkan berdasarkan golongannya.
- 3). Disamping itu juga, DIPARDA mengusulkan kepada pemda kabupaten untuk melengkapi ruangan pegawai dengan fasilitas teknologi, seperti komputer, sehingga dalam mengerjakan tugasnya dapat lebih mudah dan lebih cepat.

Semua upaya pengembangan tersebut sangat bergantung pada peran pemda Kabupaten. Dalam hal ini khususnya mengenai dana atau anggaran yang diberikan dalam pengembangan karir pegawai. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan pegawai DIPARDA sebagai berikut :

“pengadaan diklat memang sangat penting untuk peningkatan karir dan kemampuan pegawai, namun semua itu dikembalikan lagi kepada anggaran yang disediakan. Sebelum otonomi daerah, diklat sangat sering sekali diadakan, karena dana atau anggaran yang ada masih berasal dari propinsi. Namun setelah otonomi, anggaran yang ada sangat terbatas, sehingga diklat terkadang hanya dilaksanakan 1 atau 2 tahun sekali oleh pemerintah daerah kabupaten”.

(Sumber : wawancara dengan Ibu Setyawati, S.Psi Selaku Kepala Sub Bag. Kepegawaian di Kantor DIPARDA, Selasa 22 Maret 2007, Pukul 11.00 WIB)



## **C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengembangan Pariwisata**

Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata, tentunya juga menemui berbagai hambatan selain juga ditunjang oleh berbagai faktor pendukung yang dapat memaksimalkan upaya pengembangan tersebut. Mengingat kegiatan pengembangan pariwisata menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek politik juga sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya usaha pengembangan tersebut. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis, maka terdapat beberapa faktor baik faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Faktor-faktor tersebut antara lain :

### **a. Faktor-Faktor Pendukung Pariwisata**

#### **1. faktor Pendukung Intern (berasal dari dalam)**

##### **1). Letak Geografis**

Bantul merupakan salah satu wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta yang memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata yang sangat dicari oleh wisatawan luar negeri.. Posisi Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta serta dapat ditempuh dengan mudah merupakan keuntungan tersendiri yang dimiliki Bantul. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya, kota sejarah, kota pendidikan serta mempunyai predikat sebagai pusat kebudayaan Jawa merupakan tempat yang menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung selain obyek-obyek wisata yang mendunia seperti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kedekatan Bantul dengan Yogyakarta baik jarak maupun budaya dan sejarahnya merupakan keuntungan tersendiri untuk pengembangan kepariwisataan.

##### **2). Kondisi Alam**

Keadaan alam Bantul ditandai oleh 3 ciri lingkungan, yakni kawasan dataran rendah, kawasan perbukitan, dan kawasan Pantai. Dataran rendah berada dibagian tengah yang merupakan daerah subur, sementara daerah perbukitan kapur dan gamping terletak dibagian Barat dan Timur, dan kawasan pantai terhampar di bagian Selatan. Kombinasi keadaan alam ini membuat Bantul memiliki panorama yang indah. dengan suhu udara berkisar antara 20 - 34°C.

Kondisi alam semacam ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan obyek wisata yang menghasilkan keuntungan besar bagi pendapatan daerah.

### 3). Sarana Jalan dan Transportasi

Untuk mencapai wilayah Kabupaten Bantul tidaklah sulit karena sudah tersedia jalan yang cukup lebar dan memenuhi syarat, baik dari kota Jogjakarta maupun dari kota-kota di sekitarnya. Jalan-jalan yang menuju obyek-obyek wisata terutama ke Kawasan Wisata Pantai Selatan, pada umumnya sudah cukup baik sehingga wisatawan bisa berkunjung dengan rasa nyaman. Jalan-jalan yang ada juga sudah diaspal sehingga kondisinya sudah cukup baik untuk dilewati. Selain itu angkutan-angkutan yang menuju ke obyek wisata juga sudah banyak. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan beberapa terminal angkutan agar memudahkan akses menuju obyek wisata tersebut.

## 2. Faktor Pendukung Eksternal (berasal dari luar )

### 1) Keramah-tamahan Penduduk dan Keamanan

Masyarakat Jogjakarta, termasuk masyarakat Kabupaten Bantul, secara umum merupakan masyarakat yang ramah dan menyukai ketentraman. Isu *sweeping* yang pernah ada terhadap warga negara Amerika dan Inggris bukanlah representasi dari sikap masyarakat Jogjakarta yang sesungguhnya. Kenyataannya, mereka selalu *welcome* terhadap pendatang dan wisatawan. Mereka anti terhadap sikap-sikap yang mengajak kepada kerusakan. Ini terbukti dengan selalu amannya wilayah ini dari awal Reformasi hingga sekarang walaupun banyak daerah lain yang mengalami kekacauan. Kondisi ini tentu saja sangat mendukung kepariwisataan DI Yogyakarta. Wisatawan yang berkunjung tidak perlu merasa khawatir terhadap kerusakan-kerusakan yang belum tentu terjadi dan diharapkan tidak terjadi.

### 2) Faktor Keahlian Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang ada pada tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Bantul 788.821 jiwa. Banyak dari mereka menggeluti bidang industri kecil, seperti kerajinan kulit, batik kain, batik kayu, gerabah, kayu, makanan tradisional, dan peralatan tradisional. Bahkan kerajinan gerabah dari Kasongan dan Pundong serta kerajinan batik kayu dari Krebet telah menembus pasar internasional.

Sanggar-sanggar maupun lembaga budaya juga cukup banyak di Kabupaten Bantul. Bahkan mereka cukup terkenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Modal masyarakat yang berupa keahlian dalam bidang kerajinan dan keberadaan sanggar-sanggar atau lembaga budaya sangat potensial untuk kemajuan kepariwisataan Kabupaten Bantul bila bisa dikelola dengan baik.

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Kepariwisata tersebut, Kabupaten Bantul merasa terdorong untuk melakukan langkah konkrit dalam upaya pengembangan potensi-potensi obyek wisata yang begitu beragam. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004 membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian sebenarnya Daerah memiliki kesempatan terbuka untuk mengembangkan sektor kepariwisataan, mulai dari perencanaan, penetapan peraturan kepariwisataan sesuai dengan potensi diri serta penetapan perjanjian kerjasama dengan daerah/kota di dalam negeri bahkan dengan kota lain di luar negeri.

**b. Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Pariwisata**

**1. Faktor Penghambat Intern (berasal dari dalam)**

1). Rendahnya Kemampuan SDM Kepariwisata Kabupaten Bantul

Secara umum kemampuan permodalan masyarakat Bantul masih rendah. Tentu saja hal ini menjadi kelemahan tersendiri bagi kehidupan kepariwisataan Bantul. Dalam kondisi ini peran serta mereka dalam usaha pariwisata tidak bisa optimal. Permasalahan Sumber Daya Manusia berikutnya adalah banyak anggota masyarakat yang memiliki kesadaran wisata yang masih rendah. SAPTA PESONA belum diresapi dengan baik. Dengan demikian, kualitas pelayanan masyarakat kepada wisatawan pun belumlah sesuai dengan yang diharapkan. Kesadaran dan rasa memiliki masyarakat dan wisatawan terhadap obyek dan program - program kepariwisataan masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari tidak dijalaninya sapta pesona wisata yang terdiri dari keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan keramahan dan kenangan. Padahal ketujuh unsur tersebut merupakan tolok ukur dalam peningkatan kualitas pengembangan kawasan wisata. Sebagai contoh tidak dijalaninya program sapta pesona adalah,

corat -coret yang ada pada dinding Gua Gajah, Dlingo. Hal tersebut merupakan suatu contoh kongkrit vandalisme gua selain kebersihan obyek wisata yang terabaikan.

## 2). Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dinas

Sejauh ini sangat dirasakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Bantul dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum menempati gedung yang standar terkait dengan perbandingan jumlah personil, kebutuhan ruang pertemuan yang memadai, kebutuhan ruang *hall* untuk pameran, fasilitas kendaraan untuk operasional dinas, dan peralatan elektronik yang mendukung ketugasan dinas untuk pengambilan data dan melaksanakan pemasaran.

## 3). Keterbatasan Anggaran

Untuk melaksanakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul sangatlah banyak yang harus dilakukan. Berbagai kegiatan fisik, seperti pengembangan sarana dan prasarana dalam hal ini adalah sarana jalan, untuk melakukan promosi dan pemasaran juga membutuhkan dana yang sangat besar, dan menggelar berbagai atraksi, tentunya merupakan pengembangan yang sangat vital. Akan tetapi kendala keterbatasan dana sangat dirasakan oleh DIPARDA Bantul, sehingga dinas tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal

## **2. Faktor Penghambat eksternal (berasal dari luar)**

### 1). Belum Terealisirnya Paket Wisata Jalur Barat & Timur

Kabupaten Bantul telah memiliki 2 jalur wisata, yakni jalur wisata barat dan jalur wisata timur. Masing-masing jalur wisata memiliki sejumlah obyek dan daya tarik wisata yang menarik. Namun demikian, hingga saat ini kedua jalur wisata tersebut belum dijadikan jalur wisata oleh mayoritas wisatawan sehingga perlu kiat-kiat khusus untuk merealisasikannya.

### 2). Belum Mantapnya Koordinasi Kebijakan Antar Instansi Pemerintah

Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program antar instansi pemerintah banyak dijumpai di mana saja di Indonesia sebagaimana yang terjadi di Bantul. Hal semacam ini tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. Koordinasi yang mantap sangat diperlukan dalam pengembangan kepariwisataan mengingat bahwa

hakikat daripada pembangunan kepariwisataan adalah: lintas sektor, lintas wilayah, dan multidimensional.

3). Masih Lemahnya *Law Enforcement* (kekuatan hukum)

Dalam beberapa hal, Pemerintah belum mampu menerapkan hukum secara tegas. Sebagai contoh Pemerintah belum mampu menghilangkan bangunan-bangunan *illegal* yang bermunculan di obyek-obyek wisata. Masyarakat yang terlibat atau menggantungkan hidupnya dibidang kepariwisataan ada yang cenderung mengambil keuntungan secara cepat untuk hasil yang banyak. Mereka melakukannya tanpa berpikir mengenai dampak yang akan dihadapi dikemudian hari. Sebagai contoh kongkrit adalah praktek prostitusi liar yang ada di Pantai Samas dan Pandansimo, kegiatan seperti ini akan cepat mendatangkan pemasukan tetapi akan berdampak buruk terhadap anggapan masyarakat luas terhadap obyek wisata tersebut sehingga obyek wisata tersebut suatu saat akan dihindari oleh masyarakat yang merasa risih dengan kondisi yang ada.

Lemahnya kejelasan dan penegakan hukum, menjadikan obyek -obyek wisata tampak tidak tertata dengan rapi. Munculnya bangunan-bangunan liar dengan tujuan yang tidak sesuai merupakan contoh lemahnya penegakan hukum atau sebagai bukti lemahnya sosialisasi hukum itu sendiri.

4). Kekhawatiran Wisatawan Untuk Berkunjung Ke Obyek Wisata Pantai

Gempa bumi 27 Mei 2006 yang mengancurkan sebagian besar daerah Bantul serta isu akan terjadinya tsunami yang berlokasi di pantai selatan menimbulkan kepanikan dan ketakutan tersendiri bagi wisatawan yang ingin berwisata ke obyek wisata pantai. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka bila berkunjung ke pantai. Hal tersebut dapat menjadi pemicu negatifnya pandangan wisatawan mancanegara apabila ingin mengunjungi pariwisata di Yogyakarta, khususnya di Bantul. Karena pada dasarnya, Kabupaten Bantul sangat terkenal dengan obyek wisata pantainya.

**D. Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu tulang punggung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah adalah sektor kepariwisataan, mengingat sektor inilah yang sangat potensial menghasilkan pendapatan yang besar karena sifatnya yang

multisektoral dan multi-effects. Dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan mendukung income generating dari berbagai sisi mulai dari retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel dan restoran, perijinan usaha pariwisata, di samping juga menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal. Maka selanjutnya akan diuraikan mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD setelah dilakukan berbagai pengembangan oleh DIPARDA maupun oleh pemerintahan daerah setempat mulai tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006

Sejauh ini, upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh DIPARDA Bantul, yang bekerjasama dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah setempat adalah untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah Yogyakarta, khususnya Bantul. Setelah melakukan penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang tidak signifikan, namun juga tidak terlalu mengalami kemunduran. **Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan** secara keseluruhan ke Kabupaten Bantul sejak tahun 1994 tercatat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 12 :**  
**Perkembangan wisatawan di Kabupaten Bantul (1994-2004)**

Tahun	Jumlah Wisatawan
1994	1.424.109
1995	1.533.363
1996	1.287.331
1997	1.437.254
1998	1.316.642
1999	1.685.642
2000	1.231.038
2001	1.771.209
2002	1.514.889
2003	1.556.885
2004	1.537.352

Sumber: Olahan dari *RIPPDA Kab. Bantul & Statistik Dinas Pariwisata Kab. Bantul*

Data di atas menunjukkan bahwa ternyata jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke obyek wisata Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun terjadi krisis multidimensional di Indonesia. Perubahan yang paling menggembirakan terjadi pada tahun 2001, sedangkan jumlah yang mengalami penurunan terlihat pada tahun 1996 dan 2000. Kemudian pada tahun-

tahun berikutnya jumlah kunjungan wisatawan relatif stabil. Pertumbuhan pariwisata Bantul saat ini memang tidak stabil. Ketidakstabilan kondisi keamanan nasional telah menurunkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Krisis moneter yang berkepanjangan juga menurunkan minat masyarakat Indonesia untuk berwisata. Kemudian, perubahan sistem libur sekolah dasar yang semula adalah sistem kuartal menjadi sistem semester telah mengurangi waktu berwisata untuk murid sekolah dasar. Selain itu faktor yang juga sangat mempengaruhi adalah gempa 27 Mei yang mengguncang juga beberapa wilayah pariwisata di Jogja. Misalnya Tembi, Tanjung, Kasongan, dan Pundong. Tembi adalah sebuah kawasan Desa Budaya yang terletak di Kabupaten Bantul. Desa ini tingkat kerusakan wilayah desanya mencapai 75% yaitu meliputi kerusakan bangunan permukiman, galeri dan bengkel-bengkel produksi. Rumah budaya Tembi sendiri mengalami tingkat kerusakan sedang.. Sentra kerajinan gerabah dan keramik Kasongan, terletak kurang lebih 10 KM dari Jogja, mencapai kerusakan wilayah desa hingga 80% yaitu kerusakan bangunan permukiman, galeri dan bengkel-bengkel produksi gerabah dan keramik. Kemudian 90% bangunan galeri yang terdapat di sepanjang jalur utama roboh. Sedangkan sentra kerajinan gerabah dan keramik serta souvenir Pundong mengalami tingkat kerusakan wilayah desa 95% yang meliputi kerusakan bangunan permukiman, galeri dan bengkel-bengkel produksi gerabah/keramik.

Berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara, Kabupaten Bantul belum memiliki data yang akurat karena memang belum ada pelaksanaan pendataan lewat mekanisme yang ada. Belum adanya pelaksanaan pendataan ini karena selama ini dipandang bahwa jumlah kunjungan wisman tersebut belum banyak sehingga belum mendesak untuk didata.

Tetapi dengan melihat dan mengamati upaya pengembangan yang dilakukan oleh DIPARDA serta *stakeholders*, diharapkan untuk masa yang akan datang hal tersebut menjadi awal pulihnya kembali sektor pariwisata Bantul menuju arah yang lebih baik. Sehingga dengan pengembangan yang telah ataupun masih direncanakan diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ke obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Karena hal tersebut akan membawa dampak positif dalam

peningkatan PAD Bantul. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah PAD Kabupaten Bantul dari sektor pariwisata dapat dilihat dari jumlah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, serta Retribusi. Agar lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel Nomor 13 di bawah ini :

**Tabel No 13**  
**Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata**  
**Per Jenis Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2003-2006**

No	Thn	Jenis Pendapatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1	2003	Pos Pajak Daerah :			
		-P.Hotel & Restoran	201.000.000,00	201.834.755,00	100,41
		-P.Hiburan	90.000.000,00	70.157.100,00	77,95
		Jumlah	291.000.000,00	271.991.855,00	93,47
		Pos Retribusi Daerah :			
		-R.Tempat Rekreasi & olahraga	2.586.000.000,00	2.397.295.090,00	92,70
		-R. Tempat Khusus Parkir	34.215.100,00	34.309.400,00	100,28
		Jumlah	2.620.215.100,00	2.431.604.490,00	92,80
		<b>Jumlah Total</b>	<b>2.911.215.100,00</b>	<b>2.703.596.345,00</b>	<b>92,86</b>
2	2004	Pos Pajak Daerah :			
		-P.Hotel & Restoran	203.500.000,00	205.273.690,00	100,87
		-P.Hiburan	51.200.000,00	84.435.780,00	164,91
		Jumlah	254.700.000,00	289.709.470,00	113,74
		Pos Retribusi Daerah :			
		-R.Tempat Rekreasi & Olahraga	2.460.593.700,00	2.391.189.460,00	97,18
		-R. Tempat Khusus Parkir	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00
		Jumlah	2.464.628.700,00	2.395.224.460,00	97,18
		<b>Jumlah Total</b>	<b>2.719.328.700,00</b>	<b>2.684.933.930,00</b>	<b>98,73</b>
3	2005	Pos Pajak Daerah :			
		-P.Hotel & Restoran	203.500.000,00	204.996.815,00	100,73
		-P.Hiburan	80.000.000,00	80.002.675,00	100,00
		Jumlah	283.500.000,00	284.999.490,00	100,53
		Pos Retribusi Daerah :			
		-R.Tempat Rekreasi & Olahraga	2.500.000.000,00	2.279.890.760,00	91,20
		-R. Tempat Khusus Parkir	3.667.500,00	3.812.000,00	103,94
		Jumlah	2.503.667.500,00	2.283.702.760,00	91,21
		<b>Jumlah Total</b>	<b>2.787.167.500,00</b>	<b>2.568.702.250,00</b>	<b>92,16</b>



1	2	3	4	5	6
4	2006	Pos Pajak Daerah :			
		-P.Hotel & Restoran	125.000.000,00	137.089.110,00	109,67
		-P.Hiburan	61.466.000,00	70.486.400,00	114,68
		Jumlah	186.466.000,00	207.575.510,00	111,32
		Pos Retribusi Daerah :			
		-R.Tempat Rekreasi & Olahraga	1.600.000.000,00	1.401.224.050,00	87,58
		-R. Tempat Khusus Parkir	3.667.500,00	3.900.000,00	106,34
		Jumlah	1.603.667.500,00	1.405.124.050,00	87,61
		<b>Jumlah Total</b>	<b>1.790.133.500,00</b>	<b>1.612.699.560,00</b>	<b>90,09</b>

Sumber : Kantor DIPENDA Kab. Bantul

Berdasarkan tabel No. 13 diatas, dapat dilihat bahwa sektor pariwisata belum berperan dalam menyumbangkan PAD bagi pemerintah daerah. Realisasi pendapatan pada tahun 2003 sebesar 2.703.596.345,00 dari target 2.911.215.100,00 atau terealisasi sebesar 92,86 %. Kemudian pada tahun 2004 sektor pariwisata menyumbang sebesar 2.684.933.930,00 dari target 2.719.328.700,00. Pada tahun 2005 sebesar 92,16 % atau terealisasi sebanyak 2.568.702.250,00. yang terakhir adalah tahun 2006 sejumlah 1.612.699.560,00. Apabila disimpulkan, setiap tahunnya penerimaan dari sektor pariwisata mengalami penurunan, sehingga realisasi dari penerimaan tersebut belum optimal dalam menunjang PAD Kabupaten Bantul. Penurunan jumlah penerimaan sektor pariwisata ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pengelolaan obyek wisata dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana sangat terbatas pada dana atau anggaran. Kemudian penerimaan yang paling menurun drastis adalah tahun 2006. hal ini dapat dimaklumi karena pada tahun tersebut Bantul mengalami bencana gempa bumi., mengakibatkan pengunjung obyek wisata di Bantul kini menurun drastis akibat gempa. Pantai Parangtritis misalnya, setelah gempa rata-rata hanya dikunjungi 200-an wisatawan per hari. Pada dasarnya untuk empat tahun terakhir, obyek wisata di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, rata-rata dikunjungi lebih dari 1,5 juta wisatawan setiap tahunnya. Dengan jumlah wisatawan sebanyak itu, obyek wisata di Bantul seharusnya mampu menyumbang pendapatan sekitar 10 persen terhadap total retribusi daerah kabupaten ini.

### Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Selanjutnya adalah mengenai kontribusi pariwisata terhadap PAD Bantul. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap PAD, terlebih dahulu akan disajikan realisasi PAD Kabupaten Bantul untuk tahun 2003 sampai dengan 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 14 :**

#### Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran 2003-2006

No.	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	%
1	2003	31,364,543,187.76	32,882,358,490.40	104,84
2	2004	30,879,516,528.16	30,777,820,174.83	99,67
3	2005	35,006,940,813.49	37,830,787,663.37	108,07
4	2006	31,779,625,336.79	44,044,788,019.67	138,59

Sumber : Bagian Keuangan SetKab. Bantul

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tiga tahun terakhir juga menunjukkan trend positif. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 PAD Bantul mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar 112,79%. Namun Realisasi PAD tahun 2004 tersebut sedikit dibawah target, yakni sebesar Rp 30.879.516.528,16 atau realisasinya sekitar 99,67% dari target yang ditetapkan.

Kemudian mengenai kontribusi pariwisata terhadap PAD dapat dilihat pada tabel nomor 15 berikut ini :

**Tabel 15:**

#### Sumbangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul

Tahun 2003-2006

No	Tahun	Realisasi PAD (RP)	Realisasi Pariwisata (RP)	%
1	2003	32,882,358,490.40	2.703.596.345,00	8,22
2	2004	30,777,820,174.83	2.684.933.930,00	8,72
3	2005	37,830,787,663.37	2.568.702.250,00	6,79
4	2006	44,044,788,019.67	1.612.699.560,00	3,66

Sumber : Hasil Pengolahan data Primer

Dari tabel Nomor 15 di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata selama kurun waktu empat tahun terakhir rata-rata sebesar 6,85 % setiap tahunnya. Dari realiasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Bantul sangat kurang maksimal atau sangat rendah, apalagi jumlah realisasi tersebut masih di bawah target untuk setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak sekali faktor baik itu yang berasal dari internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berasal dari para pelaksana ataupun fasilitator yang kurang maksimal dalam mengelola dan mengembangkan potensi obyek wisata yang ada. Selain itu juga faktor yang sangat berperan adalah keterbatasan dana atau anggaran untuk pengembangan. Untuk faktor eksternal dapat berasal dari cuaca atau kondisi alam yang kurang begitu mendukung pada tahun-tahun terakhir ini, begitu juga dengan kondisi alam yang kurang baik melanda kawasan Indonesia, sehingga hal ini juga berpengaruh langsung terhadap perekonomian di bidang pariwisata secara keseluruhan, demikian juga untuk Kabupaten Bantul. Mengingat pariwisata Bantul ini memiliki potensi wisata dan budaya serta sejarah yang cukup tinggi untuk dikembangkan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bagi Pendapatan daerah Kabupaten Bantul sehingga diharapkan agar DIPARDA seta pemerintah daerah setempat agar lebih maksimal lagi dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada tersebut.

## **B. Analisis dan Interpretasi Data**

### **1. Potensi Pariwisata Yang Ada Di Kabupaten Bantul**

Dari penelitian yang dilakukan, kabupaten Bantul memang kaya akan potensi obyek dan daya tarik wisata yang terdiri dari sekitar 130 obyek dan daya tarik wisata alam, budaya, dan minat khusus yang berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah dan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Obyek dan daya tarik wisata itu terdiri atas wisata alam yang meliputi pantai sebanyak 6 buah, pegunungan 2 buah, 7 buah goa wisata dan hutan wanagama, serta 3 buah agrowisata. Kedua adalah wisata budaya atau wisata sejarah yang terdiri atas petilasan sejarah sebanyak 12 buah, 7 buah monumen, 13 obyek makam/ziarah, 2 buah museum yaitu museim kekayon dan museum batik, serta padepokan seni

Bagong Kusudiharjo di Kecamatan kasihan, kemudian ditambah dengan 12 situs termasuk situs keraton, situs candi dan beragam situs batu . Yang ketiga adalah wisata taman rekreasi dan pemandian, ada juga wisata pendidikan dan sentra industri kerajinan. Di Kabupaten Bantul terdapat berbagai jenis kerajinan seperti kerajinan kulit, tatah sungging, batik, gerabah, perak, emas, kriya logam, patung dan topeng kayu, bambu, keris, sulaman, tempurung, daur ulang, gamelan, anyaman enceng gondog dan pandan laut.

Potensi wisata yang bersifat abstrak seperti kesenian tradisonal, aktifitas lembaga- lembaga budaya, upacara-upacara adat dan nilai - nilai sejarah merupakan aset kepariwisataan yang ada di Kabupeten Bantul. Potensi tersebut dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau dapat juga digunakan sebagai alat dan bahan untuk pemasaran obyek - obyek wisata lainnya.

Dari sekian banyak potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada, baru sebagian yang sudah dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sedangkan untuk yang lainnya masih diupayakan untuk dikembangkan secara lebih optimal. Obyek dan daya tarik wisata yang sudah mendapatkan cukup perhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yaitu: Kawasan Wisata Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo,Goa Selarong, Goa Cerme, Taman Rekreasi Tirtotamansari, Desa Wisata Kasongan, Desa Wisata Kreet, Makam Raja-Raja di Imogiri. Obyek dan daya tarik wisata lainnya masih menunggu untuk dikembangkan secara lebih optimal.

## **2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Pariwisata Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bantul “Bantul Projo tamansari (Produktif, Profesional, Ijo Royo-Royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri) Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”, dengan mempertimbangkan potensi kepariwisataan serta aspek-aspek pendukungnya, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai Perda No. 42 Tahun 2000, maka **Visi** Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul adalah ***BENEFICIAL TOURISM (PARIWISATA YANG MENGHADIRKAN REJEKI)***.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul, diperlukan perencanaan pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan baik itu program dan kegiatan yang didanai dengan anggaran pembangunan, rutin maupun dana terobosan dan juga kegiatan dalam rangka pencapaian target. Selain itu, keterlibatan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengendalian Lingkungan, Dinas Peternakan dan Kelautan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan seterusnya mutlak diperlukan untuk mensukseskan pengembangan pariwisata. Dukungan program dari instansi lain tersebut sangat perlu karena pariwisata merupakan kegiatan yang tidak bisa mandiri dan kesuksesannya merupakan perwujudan dari kemantapan dan keberhasilan sektor lain seperti sektor keamanan, lingkungan hidup, prasarana, dan seterusnya. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dalam rangka pembangunan tidak bisa ditinggalkan. Di sisi lain, pihak swasta dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengembangan pariwisata. Merekalah yang diharapkan menjadi pelaku utama pariwisata di lapangan dan akan banyak berhadapan secara langsung dengan wisatawan. Peran mereka secara optimal tidak bisa dipungkiri akan menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata.

Strategi promosi yang tepat harus dilaksanakan. Berbagai kiat dan pembuatan materi-materi promosi yang menarik serta informatif harus dilakukan. Pelaksanaan promosinya pun sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan daerah lain sehingga terjadi efisiensi, daya guna promosi, dan keharmonisan alur aktivitas wisata yang menguntungkan semua daerah. Pada akhirnya, pembangunan pariwisata dalam konteks di atas akan membawa pada kesejahteraan bersama.

Bilamana dukungan program dari sektor atau instansi lain bisa terwujud dengan baik, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan semakin terbantu dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni mengundang, melayani, dan memuaskan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian dan nilai-nilai budaya lokal.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh DIPARDA bekerjasama

dengan berbagi instansi dan swasta dalam mengembangkan potensi obyek wisata Bantul meliputi upaya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, peningkatan promosi wisata, pengembangan kemampuan pegawai dan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya pengembangan yang dilakukan oleh DIPARDA tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

a). Pengembangan Sarana dan Prasarana

Beberapa upaya pengembangan yang dilakukan oleh DIPARDA serta instansi atau Dinas terkait meliputi :

1. Sarana Pokok Pariwisata

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk sarana pokok kepariwisataan yang meliputi Hotel, Restoran , Rumah Makan, Depot, serta sarana akomodasi telah dimiliki oleh seluruh obyek wisata yang selama ini sudah sangat eksis. Seperti Pantai Parangtritis, Pantai Samas dan Pantai Pandansimo. Di sekitar obyek tersebut DIPARDA juga telah melakukan penyeragaman terhadap warung-warung makan yang ada, sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat dengan mudah memilih tempat untuk beristirahat. Perkembangan jumlah sarana akomodasi di Kabupaten Bantul belum menunjukkan perkembangan yang berarti Di Kabupaten Bantul belum ada hotel berbintang. Yang ada baru hotel melati dan penginapan sederhana yang pada tahun 2003 tercatat terdapat sekitar 180 usaha dengan jumlah terbanyak di Kawasan Obyek Wisata Parangtritis. Walaupun demikian kualitas pelayanan yang diberikan sangat memuaskan . hal ini karena DIPARDA selalu menganjurkan kepada para pengelola obyek wisata agar selalu menjaga keserasian dan kebersihan rumah makan ataupun warung-warung mereka. Untuk faktor kebersihan dari sarana pokok tersebut dapat dikatakan sudah sangat baik.

2. Sarana Pelengkap Pariwisata

Untuk sarana pelengkap pariwisata ini para pengelola obyek wisata sudah menyediakan di dalam lokasi obyek wisata. Sarana ini meliputi mushalla dan kamar mandi umum di sekitar obyek wisata. Dari pengamatan peneliti, terkadang kondisi kebersihan dari mushalla atau kamar mandi tersebut masih kurang terjaga, khususnya untuk kamar mandi. Sedangkan untuk sarana olahraga, hanya beberapa

obyek wisata yang memilikinya. Penambahan sarana yang lain juga sedang dilakukan diantaranya renovasi TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) Parangtritis, TPR Depok, serta pembuatan toilet dan KM diPandansimo.

### 3. Sarana Penunjang Pariwisata

Untuk menunjang pariwisata bantul, keberadaan pasar seni merupakan salah satu sarana penunjang yang cukup penting. Karena pasar seni juga berperan untuk ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata. Disamping itu juga memberi kesempatan jual beli antara pedagang dan pembeli secara lebih dekat, baik itu berupa fasion, tas, sepatu, sandal, asesoris maupun aneka jajanan. Di Bantul, seringkali diadakan pasar seni sebagai salah satu dari kegiatan bantul expo seperti pasar seni gabusan dan *bantul craft center*. Sarana penunjang lainnya adalah toko souvenir. Hampir di setiap kawasan obyek wisata terdapat toko souvenir yang menjual beraneka macam barang khas dari obyek wisata tersebut. Namun untuk sarana seperti night club atau bioskop, jumlahnya masih sangat kurang. Keberadaan sarana tersebut pada dasarnya juga penting, khususnya untuk wisatawan mancanegara yang suka dengan hiburan malam. Hal tersebut belum dapat terealisasi dengan baik, karena bertentangan dengan budaya masyarakat sekitar obyek pariwisata, yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan adat-istiadat, khususnya budaya jawa. Sehingga night club atau bioskop hanya terdapat di beberapa obyek saja.

### 4. Prasarana Perekonomian

Prasarana perekonomian merupakan segala sesuatu yang dapat menunjang kelancaran dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang ada, sarana perekonomian di Kabupaten Bantul sudah cukup mendukung untuk terlaksananya kegiatan pariwisata. Prasarana tersebut adalah :

#### => Prasarana Angkutan/Transportasi

Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa untuk prasarana yang berupa jalan, baru sebagian dari fasilitas tersebut yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik. Tapi ada juga beberapa jalan yang menuju kawasan obyek wisata dalam kondisi yang belum baik, atau belum diaspal. Seperti misalnya jalan yang menuju ke kawasan pantai, keadaannya dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan bila dilewati. Namun hal tersebut bukan suatu kendala yang berarti untuk

mengunjungi obyek wisata yang ada, apalagi seluruh wilayah yang ada dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor.

Kendaraan umum yang digunakan untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata juga sudah sangat cukup memadai. Selain itu terdapat banyak usaha perjalanan wisata bagi wisatawan mancanegara yang ingin berwisata dengan lebih nyaman dan didampingi oleh pemandu, biasanya pemandu yang ada merupakan pemandu lokal dari daerah sekitar obyek wisata tersebut.

Dalam waktu dekat DIPARDA juga akan membangun jalan kornblok yang menghubungkan Parangtritis, Parangendog, Mbolong, Parangtritis dan Parangkusumo. Dengan jalan ini maka akan ada pemerataan pengunjung dan tidak terfokus satu area,. Sehingga akan terjadi pula pemerataan pendapatan terhadap para pedagang di wilayah pantai selatan.

Dari situasi di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk sarana transportasi dan angkutan wisata sudah sangat memadai sehingga dapat memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata tersebut .

#### => Prasarana Komunikasi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sarana dan prasarana komunikasi sudah sangat baik. Untuk semua wilayah pariwisata, telah tersedia warung-warung telekomunikasi atau wartel, selain itu juga bagi wisatawan yang datang tidak perlu merasa khawatir akan sinyal Hand Phone yang dibawa, karena prasarana tersebut sudah terjangkau untuk seluruh kawasan wisata. Kemudian DIPARDA juga telah bekerjasama dengan Telkom untuk menambah jaringan telepon umum biasa maupun telepon umum kartu. Pelayanan Kantor Pos dan Giro juga sudah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul , sehingga pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan lancarnya arus komunikasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang ada sehingga mendorong pengunjung untuk datang kembali ke Bantul.

#### => Prasarana Utilitas

Untuk prasarana utilitas yang meliputi listrik, air bersih, dan sumber air di kawasan wisata Bantul sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan wisatawan itu sendiri. Pemerintah daerah



bekerjasama dengan PLN dan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) untuk mensuplai kebutuhan air dan listrik untuk menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Dengan terpenuhinya prasarana air bersih dan listrik yang memadai tersebut sehingga diharapkan dapat memperlancar arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul, sehingga dengan sendirinya program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh DIPARDA dan segenap *stake holders* yang ada dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

=> Prasarana Perbankan

Dari hasil penelitian, untuk prasarana perbankan di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sudah sangat baik dalam melayani kebutuhan masyarakat maupun wisatawan, khususnya dalam hal penukaran mata uang asing. Prasarana tersebut didukung oleh adanya bank-bank pemerintah maupun bank swasta yang terdapat di Kabupaten Bantul. Seperti BPD, BNI, BRI, dan bank Mandiri. Sebagai prasarana penunjang, bank-bank tersebut sudah dapat dipakai untuk menukar mata uang asing (*money changer*) bagi wisatawan asing.

=> Prasarana Sosial

a. Prasarana Kesehatan

DIPARDA dan pemerintah daerah setempat sangat menyadari pentingnya pelayanan kesehatan bagi wisatawan dan terutama untuk masyarakat setempat dalam rangka pengembangan pariwisata yang dilaksanakan. Yang termasuk dalam prasarana kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas dan apotik. Dari pengamatan yang peneliti lakukan, di Kabupaten Bantul prasarana tersebut sudah terpenuhi dengan sangat baik. Namun di sekitar obyek wisata, prasarana tersebut hanya ada bila dilakukan event-event wisata atau pada hari libur yang jumlah pengunjungnya meningkat pada hari tersebut. Karenanya sangat dibutuhkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada wisatawan yang melakukan perjalanan apabila sedang mengalami sakit. Dianjurkan juga bagi pemilik rumah makan atau warung-warung untuk selalu menyediakan obat-obatan yang berfungsi sebagai pertolongan pertama apabila ada pengunjung yang mengalami sakit.

b. Faktor Keamanan

Rasa aman merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan wisata. Apabila kebutuhan akan rasa aman ini telah terpenuhi maka wisatawan yang datang merasa senang untuk mengunjungi kembali obyek wisata tersebut. DIPARDA sangat menyadari pentingnya hal tersebut, sehingga DIPARDA menjalin kerjasama dengan pengelola SAR di bawah kendali KESBANGLINMAS untuk menjaga keamanan di kawasan obyek wisata yang berupa pantai, seperti pantai parangtritis, pantai depok, maupun pantai lainnya. Selain itu juga dilakukan pemasangan rambu tanda bahaya seperti peringatan dilarang mandi di laut. Untuk menghindari adanya pencopetan atau pencurian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka pemerintah kabupaten bantu bekerjasama dengan satuan aparat keamanan baik itu yang berasal dari kepolisian setempat maupun dari satuan polisi pamong praja agar menjaga daerah kawasan sekitar obyek wisata. Pemerintah Kabupaten juga telah membentuk pos-pos keamanan di setiap wilayah obyek wisata. Dengan upaya pengembangan ini diharapkan menimbulkan kesan atau citra yang baik terhadap pariwisata di Kabupaten Bantul.

c. Pelayanan Terhadap Wisatawan

Salah satu komponen dalam melayani wisatawan adalah adanya pramuwisata atau biasa yang disebut dengan pemandu wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata DIPARDA bekerjasama dengan para pengelola obyek dan biro-biro perjalanan agar menyediakan jasa pemandu wisata ataupun pusat informasi wisata bagi turis mancanegara. Untuk beberapa obyek yang bersifat religius atau memiliki latar belakang budaya atau sejarah disediakan pemandu wisata khusus untuk mendampingi para wisatawan. Dengan upaya tersebut diharapkan memberikan kepuasan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek tersebut.

b). Peningkatan Pengelolaan Obyek dan Daya tarik Wisata

Harus disadari bersama seperti di awal pembahasan ini bahwa sektor pariwisata adalah multisektoral dan multi-efek. Oleh karena itu segala permasalahan sektor ini tidak dapat berdiri atau instansional, melainkan harus lintas sektoral, sebab hakekat kegiatan pariwisata yang sebenarnya adalah

kegiatan lintas budaya, wilayah, lintas ras bahkan agama. Pembangunan pariwisata adalah suatu kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak baik positif maupun negatif ke berbagai sektor pembangunan. Pariwisata yang maju jelas akan berpengaruh positif pada peningkatan sektor perindustrian, peningkatan sektor pertanian, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan seterusnya yang berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut DIPARDA harus bekerja keras agar hasil yang diperoleh juga maksimal. Seluruh rencana pengembangan yang ada tidak akan dapat berjalan dengan sukses apabila tidak dikelola secara baik dan profesional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan obyek wisata di Bantul saat ini dilakukan oleh DIPARDA dan swasta. Wewenang pengelolaan wisata dilakukan oleh DIPARDA selama tanah atau kawasan tersebut merupakan milik pemerintah daerah setempat seperti pantai Parangtritis, Pandansimo, pantai Samas, goa Cerme dan Selarong. Ada juga obyek wisata yang dikelola oleh swasta dikarenakan asetnya milik swasta, seperti Kid'fun Park. Selain itu juga dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta untuk mengelola secara bersama potensi yang ada.

Pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh DIPARDA selama ini selalu terhalang oleh anggaran yang ada. Seperti yang telah dijelaskan pada fokus penelitian, bahwa jumlah anggaran untuk pengembangan pariwisata sangat minim sekali. Untuk itu, di masa-masa mendatang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul secara bertahap akan menempatkan diri sebagai fasilitator di sektor pariwisata dengan tugas utama mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan di sektor pariwisata. Di lain pihak, pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul juga memerlukan dukungan program dari sektor atau instansi lain, di antaranya:

1. Program pengembangan prasarana jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, terutama jalan-jalan yang memudahkan akses perjalanan wisata.
2. Program pengembangan prasarana telekomunikasi dan penerangan oleh PLN, Telkom, dan Perusahaan Telekomunikasi lainnya, terutama yang mendukung keberadaan obyek dan daya tarik wisata.
3. Program pelestarian lingkungan oleh Badan Pengendalian Lingkungan. Pada saat ini pelestarian lingkungan merupakan salah satu syarat mutlak untuk kegiatan pariwisata baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

4. Program ketertiban dan keamanan oleh Kepolisian dan Satpol PP.
5. Program kemudahan perolehan modal oleh bank kepada masyarakat untuk investasi usaha bidang pariwisata.

Bilamana dukungan program dari sektor atau instansi lain bisa terwujud dengan baik, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan semakin terbantu dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni mengundang, melayani, dan memuaskan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian dan nilai-nilai budaya lokal

c). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Sampai saat ini belum seluruh masyarakat menyadari arti penting bahwa pengembangan aset wisata dan pelestarian potensi budaya akan sangat bermakna sebagai pilar penggerak perekonomian dan menjaga keutuhan bangsa. Ini berarti bahwa untuk mengawali langkahnya pemerintah harus menjawab dengan memberdayakan diri secara lebih terbuka, lebih demokratis dengan menciptakan birokrasi yang transparan, memiliki akuntabilitas dan bersikap *entrepreneur*. Sejalan dengan itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengajak pula berbagai *stakeholder* yang ada baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk bersama-sama membangun ketahanan pariwisata dan ekonomi kerakyatan melalui program-program yang tepat, baik, efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa program peningkatan peran serta masyarakat yang selama ini dijalankan oleh DIPARDA dan pemerintah daerah telah berjalan dengan cukup lancar. Program-program tersebut meliputi :

1. Memberikan penerangan dan pengarahan tentang arti dan tujuan penting dari kepariwisataan terhadap masyarakat.
2. Melakukan bimbingan dan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung kepariwisataan dengan harapan mengurangi angka pengangguran
3. Mengadakan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), seperti pelatihan ketrampilan maupun ketrampilan bahasa inggris.
4. Mendirikan sekolah-sekolah jurusan kepariwisataan

5. Merangsang dan mengajak masyarakat di setiap kecamatan untuk bersama-sama menciptakan desa wisata di wilayahnya masing-masing dengan menghasilkan produk kerajinan yang khas dari daerah tersebut.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pengelola obyek wisata dan jasa pariwisata.
7. Melakukan kegiatan gotong royong dengan masyarakat setempat untuk membersihkan obyek wisata maupun tempat-tempat bersejarah yang ada.

d). Peningkatan Promosi dan Pemasaran Wisata

Seperti yang telah dijelaskan dalam fokus penelitian bahwa dalam memperkenalkan produk obyek dan daya tarik wisata harus selalu mengutamakan informasi yang efektif, efisien, informatif, menarik, sesuai sasaran, dan mendukung pariwisata kabupaten Bantul. Dari informasi tersebut dapat diketahui banyak atau tidaknya wisatawan yang datang berkunjung ke obyek wisata di Bantul. Tentunya promosi dan pemasaran yang dilakukan harus bersifat inovatif sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Bantul.

Program promosi pariwisata meliputi kegiatan pengadaan kelengkapan sarana pameran, pameran pariwisata di dalam dan luar daerah, serta penyebaran informasi pariwisata. Langkah-langkah promosi yang dilakukan oleh DIPARDA dan *stake holders* yang terkait sudah sangat baik. Dalam hal ini penulis salut dengan masuknya Bantul dalam kelompok Java Promo (Kerjasama Pariwisata antara 14 Kab/Kota di Jawa Tengah-DIY). Promosi dan pemasaran yang dilakukan adalah :

1. Membuat brosur atau selebaran dan majalah tentang obyek-obyek wisata potensial di Kabupaten Bantul yang layak untuk dipromosikan.
2. Bekerjasama dengan media massa , baik media massa elektronik maupun media cetak untuk mendukung upaya penyampaian informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat luar negeri agar berminat berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul.
3. Membentuk Lembaga-Lembaga Budaya. Lembaga budaya perlu dikembangkan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan produk wisata maupun sebagai lembaga yang ikut mempromosikan pariwisata Bantul.

4. Promosi kesenian tradisional dan upacara adat dapat dilakukan melalui event -event wisata yang teratur. Seperti dengan lebih melibatkan wisatawan dalam prosesi upacara adat maupun kesenian – kesenian tradisional agar apresiasi wisatawan terhadap upacara adat dan kesenian tradisional meningkat sehingga warga masyarakat lokal yang menjalankan aktifitas upacara adat dan kesenian tradisional mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga upacara adat dan kesenian tradisional dapat terus dilestarikan.
5. Untuk obyek wisata yang berupa museum ,promosi dilakukan dengan penekanan pada manfaat kunjungan, sedangkan bagi pihak museum agar secara interkatif dapat memandu para wisatawan yang berkunjung sehingga dapat terjadi pengkayaan pada para wisatawan.
6. Peningkatan mutu kerajinan, inovasi pruduk dan desain hasil kerajinan serta penyebarluasan produk hasil kerajinan baik melalui event pameran, media massa.
7. Pemerintah Kabupaten Bantul juga sedang merancang beberapa kegiatan untuk memulihkan kondisi Spikologis pasca gempa 27 Mei 2006 yang telah berlalu dengan mengadakan pasar seni “Gabusan Fair”. Selain itu juga Pemerintah daerah setempat sedang merancang dan menyiapkan pembangunan pusat dan pasar seni kerajinan atau yang disebut dengan *Bantul Craft Centre* (yang bersifat non-profit) di Gabusan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dari keseluruhan usaha-usaha promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh DIPARDA sudah sangat baik, namun perlu sekali untuk meningkatkan frekuensinya, agar segala kegiatan tersebut mampu menarik lebih banyak lagi wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Bantul. Dengan demikian pariwisata bantul akan lebih berkembang dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menunjang pendapatan daerah.

e). Pengembangan Kemampuan Pegawai Sebagai Pelaksana

Pegawai merupakan pelaku utama dalam upaya pengembangan pariwisata. Dalam hal ini pegawai atau aparatur yang ada bertindak sebagai fasilitator maupun pengawas dari pengembangan itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan kualitas pegawai DIPARDA dikatakan masih sangat minim. Dari total 82 pegawai yang ada hanya beberapa yang memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik. selain itu juga ada beberapa jabatan kosong yang masih belum terisi. Hal ini seharusnya tidak terjadi, mengingat jabatan-jabatan kosong tersebut merupakan jabatan penting dalam proses koordinasi untuk rencana pengembangan pariwisata. Namun untuk menyikapi hal tersebut, DIPARDA berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap pegawainya, seperti :

1. Dengan mengikutkan pegawai-pegawai yang mempunyai potensi di bidang teknologi dalam diklat-diklat mengenai pengembangan kepariwisataan.
2. Mengikuti seminar-seminar nasional yang membahas tentang pariwisata dan perkembangan teknologinya.
3. Mengikuti kursus-kursus yang berhubungan dengan pariwisata, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Bantul.
4. Untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong, DIPARDA mengusulkan kepada kepada pemerintah daerah setempat untuk mengirimkan personil tambahan sebanyak satu atau tiga orang berdasarkan golongannya. Sehingga jabatan tersebut dapat terisi kembali.

Jabatan yang kosong tersebut adalah tata usaha, bagian umum, bagian keuangan, dan bagian ODTW. Untuk mengatasinya, sementara waktu seluruh kegiatan dari sub bagian dinas tersebut dikoordinasikan dengan sub dinas yang lain. Kondisi semacam ini dapat dikatakan sebagai faktor penghambat intern dalam program pengembangan wisata. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Setyawati, S.Psi selaku Kepala Sub Bagian kepegawaian di kantor DIPARDA, bahwa :

“Yang menjadi permasalahan adalah SDM yang dihadapkan pada keterbatasan personil yang memiliki pendidikan pariwisata. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi sekali dalam pelaksanaan tugas. Khususnya dalam upaya pengembangan pariwisata saat ini”.

(Wawancara hari Selasa 22 Maret 2007, Pukul 11.00 WIB)

### **3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengembangan Pariwisata**

Bantul adalah salah satu kabupaten di DI Jogjakarta yang memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Bantul dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Dalam mengelola potensi kepariwisataan, tentunya terdapat hambatan maupun pendukung dalam pengembangan tersebut. Dengan mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang ada, tentunya dapat memudahkan para aparaturnya untuk membuat formulasi kebijakan yang akan ditempuh nantinya, serta peluang dan tantangan apa yang menghadang.

#### **a). Faktor-faktor Pendukung Pariwisata**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dianalisis beberapa faktor Pendukung dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Faktor pendukung tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan pengembangan, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Faktor Pendukung Yang Berasal Dari Dalam (Intern), terdiri dari :**

###### **1). Letak Geografis**

Posisi DI Jogjakarta sebagai daerah tujuan wisata yang cukup dominan selain Bali dan Lombok jelas sangat menguntungkan untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya dan memperlama durasi tinggalnya wisatawan (*length of stay*) di Bantul. Posisi ini juga didukung dengan potensi wisata dimana Kabupaten Bantul memiliki obyek-obyek wisata yang spesifik dan dari segi ritual historis berkaitan erat dengan Kraton Jogjakarta (sebagai contoh Pantai Parangkusumo) serta memiliki cerita-cerita legenda. Hal ini akan menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan yang mengunjungi Jogjakarta untuk mengunjungi juga obyek wisata yang ada Kabupaten Bantul. Selain itu juga Kabupaten Bantul kaya akan aset budaya dan kesenian. Bantul juga merupakan produsen serta pemasok utama produk-produk kerajinan Daerah Istimewa Jogjakarta. Sebagai kabupaten yang dikelilingi sejumlah Perguruan Tinggi besar maka ketersediaan lembaga dan pakar pemerhati pariwisata cukup banyak, sehingga peluang kerjasama dengan mereka guna memikirkan pengembangan pariwisata Bantul sangat terbuka lebar.



## 2). Kondisi Alam

Iklim yang sejuk dengan berbagai pandangan dan panorama yang indah adalah salah satu potensi pendukung dalam mengembangkan wisata yang ada. Selain kondisi alam yang dikelilingi pegunungan, Kabupaten ini juga memiliki banyak pantai yang merupakan obyek favorit para turis mancanegara jika melakukan wisata.

## 3). Sarana Jalan dan Transportasi

Dari hasil penelitian, Jalan-jalan di Kabupaten Bantul yang menuju obyek-obyek wisata terutama ke Kawasan Wisata Pantai Selatan, pada umumnya sudah cukup baik sehingga wisatawan bisa berkunjung dengan rasa nyaman. Sebagian besar jalan beraspal di Kabupaten Bantul juga dalam kondisi baik. Selain itu Jumlah angkutan umum yang melayani wisatawan dari kota ke obyek wisata Bantul juga sudah memadai. Keberadaan prasarana yang lain, seperti air, listrik ataupun penerangan jalan juga sudah cukup baik. Apabila para wisatawan ingin beristirahat juga telah tersedia penginapan serta rumah makan yang menyediakan makanan khas dari daerah tersebut.

## **2. Faktor Pendukung Yang Berasal dari Luar (Ekstern)**

### 1). Keramah tamahan Penduduk dan Keamanan

Salah satu slogan dari kota Yogyakarta adalah “Jogja Berhati Nyaman”. Sebagai salah satu Kabupaten dari kota tersebut, keramah tamahan yang dimiliki oleh penduduk Bantul sangat menyenangkan. Penduduk Bantul sendiri sangat menyukai ketentraman. Sambutan mereka terhadap pendatang ataupun wisatawan yang datang sangat baik sekali. Walaupun di daerah lain banyak sekali terjadi kerusuhan dan perpecahan, terbukti wilayah ini sampai sekarang masih dalam kondisi aman. Sehingga wisatawan yang ingin berkunjung tidak perlu merasa khawatir akan adanya kerusuhan yang belum tentu terjadi.

### 2). Faktor Keahlian Penduduk

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penduduk Bantul merupakan orang-orang yang giat dan tekun dalam memperbaiki hidup, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Berdasarkan data kependudukan yang ada pada tahun 2002, jumlah penduduk

Kabupaten Bantul 788.821 jiwa. Namun kebanyakan dari mereka menggeluti bidang industri kecil, seperti kerajinan kulit, batik kain, batik kayu, gerabah, kayu, makanan tradisional, dan peralatan tradisional. Bahkan kerajinan gerabah dari Kasongan dan Pundong serta kerajinan batik kayu dari Krebet telah menembus pasar internasional. Dengan sendirinya pariwisata kerajinan di Bantul telah berhasil membawa nama Bantul sebagai salah satu kawasan wisata yang patut untuk dikunjungi. Hal ini tentunya menjadi pemicu positif dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata Kabupaten Bantul itu sendiri.

### 3). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata

Undang-undang No 9 tersebut merupakan salah satu faktor pendorong bagi DIPARDA dan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan obyek-obyek wisata yang memiliki potensi untuk menunjang pendapatan asli daerah. Di era otonomi saat ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola aset dan potensi daerah yang dimilikinya. Demikian juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber wisata yang dimiliki agar mampu mengoptimalkan kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

#### **b). Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Pariwisata**

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul dapat dianalisis sebagai berikut :

##### **1. Faktor Penghambat Yang Berasal dari Dalam (Intern)**

###### 1). Rendahnya Kemampuan SDM Kepariwisata Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambaran yang diperoleh peneliti dapat menganalisis bahwa rendahnya sumber daya manusia yang ada, termasuk aparatur maupun masyarakatnya masih sangat rendah. Pengamalan *Sapta Pesona* dari *stake holders* di bidang pariwisata khususnya masih sangat rendah, sehingga pelayanan yang diberikan kepada wisatawan masih kurang. Selain itu juga modal masyarakat Bantul secara umum masih cukup rendah, hal ini tentunya menjadi penghambat dalam pengembangan potensi yang ada, karena

keberhasilan suatu program pengembangan tidak dapat lepas dari peran serta dan dukungan dari masyarakat sekitarnya.

Di era good governance sekarang ini, model pelayanan publik yang kurang nyaman, bertele-tele, lamban apalagi dengan muka masam, sudah selayaknya ditinggalkan. Oleh karena itu menjadikan Sapta Pesona pariwisata ( aman, indah, tertib, bersih, ramah-tamah dan kenangan) sebagai pedoman insan pelaku pariwisata harus dimulai dari keteladanan para birokratnya

### 2). Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dinas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberi gambaran bahwa kondisi sarana dan prasarana dinas yang ada di DIPARDA Kabupaten Bantul masih sangat minim sekali. Untuk sarana gedung kantor dapat dikatakan masih belum memenuhi standart, apalagi dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Pengaturan ruang kantor pun masih belum baik, kebutuhan akan ruang pertemuan yang memadai, ruang *hall* untuk pameran, serta fasilitas kendaraan untuk operasional dinas, dan peralatan elektronik yang mendukung ketugasan dinas untuk pengambilan data dan melaksanakan pemasaran juga masih belum maksimal. Selain itu belum terdapat kantin atau tempat istirahat bagi pegawai pada saat jam istirahatnya. Prasarana penunjang seperti tempat fotokopi juga belum tersedia. Tentunya segala keterbatasan ini menjadi kendala bagi DIPARDA dalam melaksanakan tugasnya.

### 3). Keterbatasan Anggaran

Pengelolaan obyek wisata Bantul memang sering dinilai kurang maksimal oleh masyarakatnya. Faktor penghambat yang dominan adalah masalah anggaran. Pengalokasian dana bagi pengembangan pariwisata Bantul seringkali mengalami kesulitan, Untuk tahun 2007 saja APBD untuk DIPARDA hanya sebesar 2,1 Milyar. Jumlah ini pastinya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan begitu besarnya potensi wisata yang dimiliki oleh kabupaten Bantul. Selain itu juga sistem penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah memakan waktu yang cukup lama, sehingga secara otomatis pengembangan yang dilakukan menjadi terhambat

## 2. Faktor Penghambat Dari Luar (Ekstern)

### 1). Belum Terealisirnya Paket Wisata Jalur Barat & Timur

Pada dasarnya wisata Bantul telah memiliki dua jalur wisata yang dapat dilewati oleh para wisatawan. Masing-masing jalur tersebut memiliki obyek wisata yang berbeda-beda untuk dinikmati. Jalur tersebut berupa jalur barat dan jalur timur. Tapi pada kenyataannya banyak sekali wisatawan yang mencari jalan lain untuk menuju suatu kawasan wisata. Sehingga jalur tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jalur tersebut masih dianggap cukup jauh untuk sampai ke obyek yang dituju. Dari keadaan tersebut dapat dilihat bahwa paket wisata yang diupayakan oleh pemerintah daerah belum terealisasi dengan baik.

#### 2). Belum Mantapnya Koordinasi Kebijakan Antar Instansi Pemerintah

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata peneliti dapat memperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi antara pelaku pariwisata, Pemerintah Daerah dan pihak terkait masih sangat lemah. Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa dukungan Pemerintah akan pengembangan pariwisata masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyak obyek wisata yang tidak dikelola oleh DIPARDA.

#### 3). Masih Lemahnya *Law Enforcement* (kekuatan hukum)

Dampak negatif kegiatan kepariwisataan memang ada. Prostitusi yang merebak, perjudian, penjualan minuman keras yang tak terkendali, dan kerusakan lingkungan obyek wisata merupakan sebagian contoh dampak negatif kegiatan kepariwisataan. Namun produk hukum yang ada belum berani untuk menekan dampak negatif tersebut.

#### 4). Kekhawatiran Wisatawan Untuk Berkunjung Ke Obyek Wisata Pantai

Seandainya saja ombak pantai selatan tidak begitu besar sehingga wisatawan bisa melakukan kegiatan seperti berenang, berselancar (*surfing*) atau memancing di tengah laut, maka sangat terbuka kemungkinan akan semakin banyaknya wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi obyek wisata di pantai selatan. Apalagi untuk tahun-tahun terakhir ini kondisi cuaca tidak begitu baik. terjadinya gempa 27 Mei 2006 yang lalu disertai dengan isu tsunami membuat kondisi kepariwisataan di Bantul mulai merosot. Kondisi pariwisata di sejumlah kawasan pantai di Bantul dan Gunung Kidul, DI Yogyakarta, yang belum

pulih dikhawatirkan kembali terpuruk akibat peristiwa terjadinya gelombang pasang.

#### **4. Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah**

##### **1). Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata**

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam arti luas yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Namun kontribusi sektor pariwisata untuk PAD sebesar 6,85 % setiap tahunnya dikatakan masih belum optimal. Karena pada dasarnya yang sangat mempengaruhi terhadap sektor pariwisata adalah kunjungan wisatawan. Dari data yang telah disajikan untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul selama kurun waktu 1999-2004 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, namun tidak juga mengalami penurunan. Akan tetapi, untuk tahun 2005 dan 2006 wisatawan yang datang memang mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena kondisi alam yang kurang baik di beberapa daerah di Indonesia sehingga ikut mempengaruhi arus kunjungan wisatawan ke daerah Bantul. Selain itu juga keadaan Negara Indonesia mengalami berbagai krisis dan gejolak politik sehingga para wisatawan yang ingin berkunjung sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka.

Untuk pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata dapat diperoleh dari beberapa jenis pendapatan yang tentunya pendapatan yang berasal dari pariwisata saja yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan retribusi. Retribusi terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi tempat parkir khusus seperti parkir di pantai parangritis, pandansimo dan lainnya. Dari data yang telah disajikan pada fokus penelitian penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2003 sebesar 2.703.596.345,00, kemudian tahun 2004 sebesar 2.684.933.930,00, menyusul tahun 2005 2.568.702.250,00 dan yang terakhir tahun 2006 sebesar 1.612.699.560,00. dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa setiap tahunnya realisasi pendapatan dari sektor pariwisata mengalami penurunan. Sehingga kontribusi

yang diberikan oleh sektor pariwisata untuk menunjang pendapatan daerah masih belum maksimal.

## 2). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Berdasarkan data yang telah disajikan dapat diketahui bahwa PAD di Kabupaten Bantul selama empat tahun terakhir masing-masing sebesar 4,84 % pada tahun 2003, tahun 2004 sebesar turun sebesar 0,33 %, tahun 2005 naik sebesar 8,7 % dan tahun 2006 terealisasi sebesar 38,59 % dari target yang diharapkan. Sehingga rata-rata PAD Bantul untuk empat tahun terakhir sebesar 13,11 %.

Sedangkan untuk kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Bantul berdasarkan data yang ada yaitu pada tahun 2003 sebesar 8,22 %, tahun 2004 sebesar 8,72 %, tahun 2005 sebesar 6,79 % dan tahun 2006 sebesar 3,66 %. Sehingga diketahui bahwa rata-rata kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul untuk kurun waktu empat tahun terakhir yaitu selama 2003-2006 adalah sebesar 6,85 % untuk tiap tahunnya.

Jika diamati mengenai jumlah perolehan PAD untuk empat tahun terakhir memang mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2006. Namun Dengan jumlah penduduk sekitar 788.821 orang dan luas lebih dari 506,83 km<sup>2</sup>, maka PAD tahun 2006 yang baru sekitar 44 milyar rupiah sangatlah tidak mencukupi bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pembangunan yang mandiri dan menyeluruh di Bantul. Apalagi dengan adanya semangat otonomi daerah di mana secara berangsur-angsur setiap daerah harus mampu berdiri sendiri baik dalam pembangunan maupun anggaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusinya. Selama ini sangat dirasakan sekali banyaknya faktor-faktor penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, potensi pariwisata yang ada telah banyak di kelola oleh pihak swasta, mengingat sektor ini merupakan lahan subur untuk menanamkan investasi sehingga sektor pariwisata yang ada lebih banyak dimanfaatkan sebagai sektor bisnis.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang dilakukan terhadap fokus penelitian mengenai permasalahan Pengembangan Pariwisata Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bantul, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bantul adalah salah satu kabupaten di DI Jogjakarta yang memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Jumlah keseluruhan dari potensi obyek wisata tersebut adalah 130 buah. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. . Dari sekian banyak potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada, baru sebagian yang sudah dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sedangkan untuk yang lainnya masih diupayakan untuk dikembangkan secara lebih optimal. Obyek dan daya tarik wisata yang sudah mendapatkan cukup perhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yaitu: Kawasan Wisata Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo, Goa Selarong, Goa Cerme, Taman Rekreasi Tirtotamansari, Desa Wisata Kasongan, Desa Wisata Kreet, Makam Raja-Raja di Imogiri.
- b). Upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh DIPARDA Bantul bekerjasama dengan swasta dan masyarakat meliputi 5 upaya pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan sarana dan prasarana seperti pelebaran jalan dan pengaspalan jalan, meningkatkan jumlah angkutan umum dan menambah jalur wisata, menambah jumlah kamar mandi umum di sekitar kawasan Parangtritis, serta mengembangkan jumlah hotel dan rumah makan di sekitar obyek wisata. Untuk sarana perekonomian, pemerintah daerah setempat telah menyediakan bank BRI, MANDIRI, Bank BCA, dan Bank BPD untuk melayani penukaran uang asing maupun untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga mengembangkan

keberadaan pasar seni yang berpusat di Gabusan sebagai prasarana penunjang pariwisata. Untuk pengembangan komunikasi DIPARDA bekerjasama dengan PLN agar menambah jumlah jaringan untuk telepon bergerak maupun telepon selular di setiap kawasan wisata. Bagi prasarana sosial seperti rumah sakit, pelayanan wisatawan dan faktor keamanan, DIPARDA sudah bekerjasama dengan Dinas kesehatan, pengelola obyek wisata dan dari satuan kepolisian untuk menunjang program pengembangan tersebut. Yang kedua adalah peningkatan pengelolaan obyek wisata dilakukan dengan koordinasi lintas instansi, selain itu DIPARDA juga melibatkan peran dari masyarakat dan swasta. Pengembangan yang ketiga adalah peningkatan peran serta masyarakat dan swasta. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam POKDARWIS, memasyarakatkan dan menjadikan SAPTA PESONA sebagai pijakan utama dalam pengembangan pariwisata, merangsang masyarakat untuk mendirikan desa wisata di daerahnya masing-masing, serta melakukan pendekatan dan pengarahan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kemudian upaya pengembangan yang keempat adalah peningkatan promosi dan pemasaran wisata yang dilakukan dengan Secara langsung aktif dalam organisasi Java Promo, yaitu suatu kegiatan promosi wisata yang bekerjasama dengan 14 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat brosur dan selebaran, membentuk lembaga-lembaga budaya, dan mengadakan event-event wisata. Yang kelima adalah pengembangan kemampuan pegawai sebagai pelaksana dari kegiatan pengembangan tersebut. Untuk itu pegawai yang belum maksimal dalam pendidikan pariwisata diikutkan dalam kursus-kursus kepariwisataan. Selain itu dilakukan seminar atau diklat setiap 2 tahun sekali.

- c). Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan kepariwisataan meliputi letak geografis, kondisi alam, sarana jalan dan transportasi, keramah tamahan penduduk dan keamanan, faktor keahlian penduduk dari masyarakat Bantul, serta adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata Bantul adalah Rendahnya Kemampuan SDM Kepariwisataan Kabupaten Bantul, belum terealisirnya paket wisata jalur timur dan barat, masih



Lemahnya *Law Enforcement* (kekuatan hukum), belum Mantapnya Koordinasi Kebijakan Antar Instansi Pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana dinas, keterbatasan anggaran dan adanya kekhawatiran wisatawan untuk berkunjung ke wilayah pantai.

- d). Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah Bantul meliputi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, sedangkan dari pos retribusi adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi tempat khusus parkir. Menurut data yang diterima oleh peneliti, dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah Bantul selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun untuk sumbangan dari sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 selalu mengalami penurunan.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami penurunan dari tahun 2003 hingga tahun 2006, sedangkan kenyataan menunjukkan bahwa Bantul sangat kaya dengan potensi obyek dan daya tarik wisatanya. Untuk itu peneliti berusaha memberikan beberapa saran serta masukan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan pengembangan pariwisata yang lebih baik lagi di masa datang sehingga kontribusi dari sektor pariwisata bisa lebih optimal. Saran dan masukan tersebut sebagai berikut :

- a). Untuk mengatasi menyusutnya kunjungan wisatawan nusantara setelah terjadinya Gempa Bumi 27 Mei, maka perlu diversifikasi produk wisata untuk tetap menjangkau kunjungan wisatawan nusantara tersebut. Misalnya dengan mengadakan event yang menyorot perhatian publik khususnya anak muda di obyek wisata tersebut seperti parade musik, ataupun moto-cross.
- b). Untuk mengatasi obyek wisata yang tipikalnya sama, bisa dilakukan upaya pencarian citra/image baru seperti dengan pantai Parangtritis diberikan suatu citra baru sebagai daerah wisata kuliner masakan laut yang murah dan higienis. Kemudian juga perlu diperbaiki dan dilengkapi fasilitas obyek wisata serta akses menuju obyek wisata. seperti menambah lagi jumlah toilet umum dan menjaga kebersihannya.

c). Yang perlu disadari bersama adalah bahwa kualitas pelayanan kepariwisataan yang baik kepada wisatawan akan memberikan kenangan yang tak terlupakan dan menjadi sarana promosi yang paling efektif melalui komunikasi interpersonal untuk mendongkrak jumlah wisatawan di masa mendatang. Di era *good governance* sekarang ini, model pelayanan publik yang kurang nyaman, bertele-tele, lamban apalagi dengan muka masam, sudah selayaknya ditinggalkan. Oleh karena itu menjadikan Sapta Pesona Pariwisata ( aman, indah, tertib, bersih, ramah-tamah dan kenangan) sebagai pedoman insan pelaku pariwisata harus dimulai dari keteladanan para birokratnya.

d). Harus disadari bersama seperti di awal tulisan ini bahwa sektor pariwisata adalah multisektoral dan multi-efek. Oleh karena itu segala permasalahan sektor ini tidak dapat berdiri atau instansional, melainkan harus lintas sektoral, sebab hakekat kegiatan pariwisata yang sebenarnya adalah kegiatan lintas budaya, wilayah, lintas ras bahkan agama. Dengan adanya pemahaman yang demikian tersebut akan memudahkan untuk duduk dalam satu lingkaran untuk membahas peluang dan tantangan di Era Otonomi Daerah. Oleh karenanya perlu kesepahaman dari berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan ideal bersama. Berbagai kalangan perlu duduk bersama membicarakan agenda pariwisata yang krusial. Tentu saja butuh kemauan dan jiwa besar bagi semua pihak terkait untuk berada pada posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

e). Untuk mengatasi kekurangan dana bagi DIPARDA dalam upaya pengembangan obyek-obyek wisata yang dianggap potensial, sebaiknya DIPARDA dalam mengajukan usulan kepada pemerintah provinsi memberikan rincian-rincian tentang obyek wisata yang masuk dalam skala prioritas pengembangan dan perkiraan dana yang harus dikeluarkan. Sehingga, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah propinsi untuk mengucurkan dana yang lebih dan sebanding dengan jumlah obyek yang akan dikembangkan.

f). Agar pengembangan yang dilakukan lebih optimal, maka sebaiknya para personil atau pegawai yang ditempatkan di DIPARDA harus benar-benar mempunyai ketrampilan dan latar belakang pendidikan kepariwisataan. Selain itu kegiatan diklat yang ada harus lebih ditingkatkan lagi frekuensinya ditambah

dengan mengikuti kursus-kursus kepariwisataan atau jika perlu mengadakan studi banding ke daerah lain yang pembangunan pariwisatanya sudah sangat maju.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darmajati, R.S, 1975. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata* .Jakarta : Pradya Paramita
- Hamid, Chalik, 1996. *Pengetahuan Pariwisata*. Jakarta : Yayasan Bhakti Membangun
- Ismani, HP dan Suyadi, Imam, 1987. *Metodologi Penelitian*. Malang : FIA UNIBRAW.
- Ichsan, Moch dan Ratih Nur Pratiwi, 1989. *Pokok-Pokok Administrasi Keuangan Daerah*. Malang : FIA UNIBRAW
- Mardiasmo, 1989. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Miles, Mattew, BS, Huberman A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rihidi, Cetakan I . Jakarta : UI Pres
- Mussanef, 1995. *Manajemen Kepariwisata di Indonesia*. Jakarta : Toko Agung
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya
- Nasution, S. 1982. *Metode Penelitan Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Nagib, Laila, 2003. *Ketenaga kerjaan dan Industri Pariwisata di Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Nazir. Moch. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndrahu, Sunarto, 1983. *Mendayagunakan Potensi Pariwisata Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta : CSIS
- Pendit, Nyoman, S. 1994. *Ilmu Berwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Riwu, Kaho, Josef. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Sianipar, JP.G. 1998. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta : LAN-RI

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3 ES.

Sugiantoro, Ronny, 2000. *Pariwisata Antar Obsesi dan Realita*. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.

Spillane, J. James, 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta.

Thoah, Miftah. 1995. *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta.

Yoeti, Oka, A. 1993. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

Yoeti, Oka, A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Pedoman penyusunan dan Ujian skripsi. 1997. Malang : FIA UNIBRAW

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989

#### **Peraturan Perundangan :**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Peraturan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

#### **Website**

[Http:// www. Pemkab.bantul.go.id](http://www.pemkab.bantul.go.id). Diakses pada tanggal 16 Agustus 2006

[Http:// www.jogja.go.id](http://www.jogja.go.id). Diakses pada tanggal 10 Desember 2006

**Daftar Interview Guide DIPARDA Bantul**

- 1) Potensi pariwisata apa saja yang ada di Kabupaten Bantul ?
- 2) Bagaimanakah upaya pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam mengembangkan sektor pariwisata?
- 3) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana kepariwisataan di Kabupaten Bantul ?
- 4) Sejauh ini promosi seperti apa saja yang dilakukan DIPARDA untuk memperkenalkan obyek wisata Bantul?
- 5) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pengembangan sektor pariwisata ?
- 6) Bagaimana koordinasi antar pemda dengan masyarakat setempat dalam upaya pengembangan sektor pariwisata?
- 7) Seperti apa peran organisasi swasta dalam pengembangan pariwisata Bantul ?
- 8) Dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan bagaimanakah kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bantul ?
- 9) Apakah ada Peraturan daerah atau Undang-undang yang mengatur tentang kontribusi pariwisata terhadap PAD?
- 10) setelah gempa 27 Mei 2006, bagaimanakah kondisi obyek wisata Bantul?

**Daftar Interview Guide DIPENDA Bantul**

- 1) Dari dinas atau instansi mana saja yang memberikan kontribusi besar bagi PAD Bantul?
- 2) Berapa persentase anggaran yang diberikan kepada dinas pariwisata terkait dalam pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan?